BADAN PENGARAH PAPUA
BADAN PENGARAH PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
KANTOR BPP PAPUA BARAT DAYA, GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) SORONG
JALAN BASUKI RAHMAT KM 7, KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kontak: 0821-1301-2811; Email: pbdbp3okp@gmail.com

Sorong, 10 September 2026

Nomor : 4/SPny/BPP-PBD/SOQ/IX/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Bulanan BPP Periode Bulan Agustus 2026**

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) Badan Pengarah Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, serta menindaklanjuti Surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Agustus 2026**.

Laporan tersebut memuat uraian pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang meliputi aspek kelembagaan, pelaksanaan SHEK pada masing-masing misi percepatan pembangunan Papua (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai/Polhukam), dokumentasi kegiatan, capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang solutif.

Adapun dokumen laporan dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1bmWuZVSwresgQbyclDh2piccSICQ9Zes?usp=sharing

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terimakasih.

Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
SEKRETARIAT
BP3OKP
PAPUA BARAT DAYA

DRS. OTTO IHALAUW, MA

Tembusan:
1. Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari
2. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA

PERIODE BULAN AGUSTUS 2026



BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Agustus Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Agustus 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Dasar Hukum (Landasan) 4
1.2 Maksud dan Tujuan 5
1.3 Ruang Lingkup 5
BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA 7
2.1 Definisi BPP 7
2.2 Tugas BPP 7
2.3 Fungsi BPP 7
2.4 Struktur BPP 8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 9
3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat 9
3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas 42
3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif 53
3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam/Damai 93
3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi) 116
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN, TANTANGAN 204
4.1 Capaian 204
4.2 Permasalahan 205
4.3 Tantangan 206
BAB V PENUTUP 208
5.1 Kesimpulan 208
5.2 Rekomendasi 208
5.3 Penutup 209

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (Landasan)

A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
    1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
    3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
    4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
    5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
    1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
    2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
    3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Agustus 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

2. Tujuan

   Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

   1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Agustus 2026.
   2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPPP.
   3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah Papua.
   4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
   5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

1.3 Ruang Lingkup

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Agustus 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–30 Agustus 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.

BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA

2.1 Definisi BPP

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2.2 Tugas BPP

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Fungsi BPP

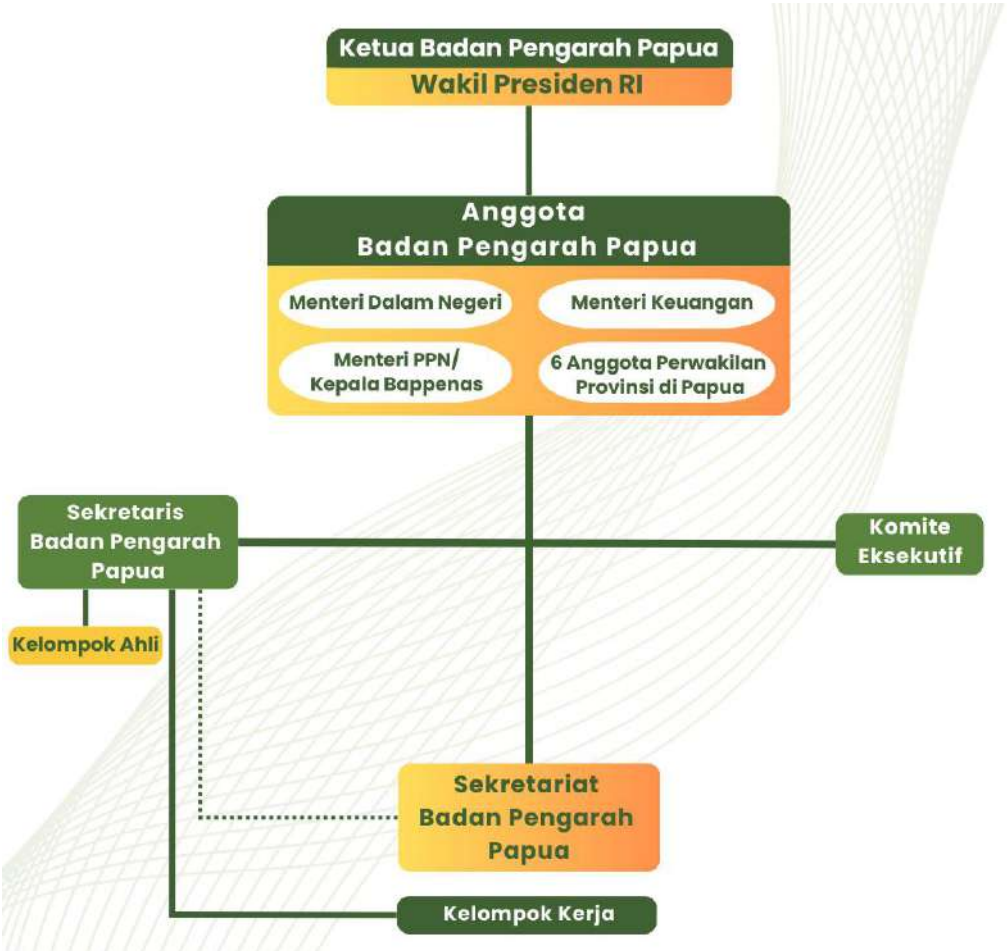
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan

percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;

c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.4 Struktur BPP



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Forum Komunikasi, Monitoring, Pembahasan serta Pengambilan Kebijakan terkait Program JKN-KIS di Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 4 Agustus 2026 Ruang Rapat Anggrek Lt II, Kantor Walikota Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	**Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang Berkualitas:** Tujuan utama forum ini adalah untuk menguatkan strategi rekrutmen peserta baru dan mereaktivasi peserta yang sudah ada agar seluruh masyarakat Kota Sorong mendapatkan perlindungan kesehatan yang merata dan berkualitas.

	Masalah Penonaktifan Peserta PBIJK: Terdapat kendala besar di mana sekitar 69.354 warga Kota Sorong menjadi nonaktif dari kepesertaan PBIJK (Penerima Bantuan Iuran yang dibayarkan APBN) berdasarkan validasi data dari Kementerian Sosial. Hal ini terjadi karena perubahan data kesejahteraan (DESIL) yang menyebabkan puluhan ribu warga tidak lagi dapat mengakses layanan kesehatan JKN. **Kehadiran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial:** Wakil Wali Kota menekankan bahwa pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini dianggap sangat krusial karena kondisi ekonomi negara yang terbatas membuat biaya pelayanan kesehatan mandiri terasa berat bagi sebagian besar warga. **Optimalisasi Anggaran Daerah:** Forum ini bertujuan untuk menyinkronkan kebutuhan anggaran tahun 2026 agar tetap mencukupi untuk membiayai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Jamkesda) serta memastikan kesinambungan program JKN. **Sosialisasi Program Baru bagi ASN:** Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyosialisasikan kebijakan iuran 1% bagi ASN dan PPPK untuk mendaftarkan anggota keluarga

	tambahan (seperti orang tua atau mertua) agar mendapatkan biaya yang lebih murah dan jaminan layanan yang lebih pasti. **Sinergi Antarinstansi:** Diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan BPKAD, untuk mengatasi masalah pemutakhiran data (ground check) di lapangan agar peserta yang benar-benar membutuhkan dapat kembali aktif.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	**Sinkronisasi dan Koordinasi Anggaran:** Mendorong agar isu pendanaan JKN (seperti kesenjangan antara biaya pelayanan dan iuran) dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu Forum SHEK KDH (Kepala Daerah). Tujuannya adalah menciptakan skema “keroyok bersama” atau kolaborasi pendanaan antara pemerintah provinsi dan kota berdasarkan variabel jumlah penduduk. **Harmonisasi dengan Program Strategis:** Memastikan program pembiayaan jaminan kesehatan ini masuk dan selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), khususnya pada program mobile healthcare dan akses layanan kesehatan. **Evaluasi Keuangan dan Layanan:**

	Melakukan evaluasi terhadap beban biaya kesehatan di Kota Sorong yang mencapai Rp77 miliar dibandingkan dengan iuran yang masuk hanya Rp12,5 miliar. Pokja Sehat ingin memetakan apakah biaya tersebut lebih banyak terserap untuk layanan promotif/preventif atau kuratif (FKTP/FKTRL) sebagai bahan pengambilan kebijakan. **Optimalisasi Data melalui Koordinasi Lintas Sektor:** Memberikan masukan mengenai perlunya integrasi data jaminan sosial dalam sensus ekonomi atau pendataan BPS agar pemerintah memiliki data coverage yang jelas (mandiri, PBI, dll.) untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. **Penguatan Pelaksanaan di Lapangan:** Mendukung penguatan peran distrik, lurah, dan kampung dalam melakukan validasi data (“jemput bola”) sehingga masalah kepesertaan nonaktif dapat tuntas di akhir tahun dan tidak menjadi beban anggaran yang mengambang.
Peserta Kegiatan	**Pimpinan dan Pengarah Forum:** • Bapak Ansar Karim, AMD: Wakil Walikota Sorong, bertindak sebagai pengarah forum. • Bapak Rudi E. Laku, S., M.M.: Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, bertindak sebagai Ketua Forum dan pemimpin sesi diskusi. • Asisten 2 Sekretaris Daerah Kota Sorong.

	Pihak BPJS Kesehatan: • Bapak Nurullah Hanafi (Hans): Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, bertindak sebagai sekretaris forum dan pemapar materi utama. • Staf dan perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Sorong. **OPD dan Instansi Terkait:** • Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong (diwakili oleh Ibu Sulce dalam diskusi). • Kepala Dinas Sosial (Ibu Mulyani). • Kepala Dinas Tenaga Kerja (Ibu Nur). • Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). • Kepala BAPPEDA Kota Sorong. • Kepala Bagian Hukum. • Kepala Dinas Kominfo. • Perwakilan dari BKPSDM. • Pokja Sehat BPP (Badan Pengarah Papua): drg. Rosaline Iriana Krimadi, Sp.PM., MPH.; dr. Alouisius Feliciano Uspessy, MMRS.; dr. Meilin Riko Mundingsari. • Unsur Forkopimda Kota Sorong yang sempat hadir. • Staf protokol dan pembawa acara (MC).
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	**1. Profil dan Capaian Kepesertaan JKN**

	• Data Penduduk: Kota Sorong memiliki total penduduk sekitar 288.661 jiwa (data semester 2 tahun 2025) dengan cakupan kepesertaan mencapai 301.275 jiwa. • Komposisi Peserta: Segmen terbesar adalah PBIJK (iuran dibayar APBN) sebesar 55%, diikuti peserta yang dibayar APBD sekitar 15%, dan badan usaha 12%. • Masalah Keaktifan: Meskipun cakupan tinggi, tingkat keaktifan hanya sekitar 80%. Terdapat gap sekitar 50.000–60.000 orang yang memiliki identitas JKN, tetapi kartunya nonaktif. **2. Isu Krusial: Penonaktifan 69.354 Peserta PBIJK** • Penyebab: Berdasarkan validasi Kementerian Sosial (SK Mensos) tahun 2026, sebanyak 69.354 warga Kota Sorong dinonaktifkan dari kepesertaan PBIJK. • Perubahan Desil: Banyak warga mengalami kenaikan desil (dari desil 1–5 menjadi desil 6–10) atau datanya belum teridentifikasi sehingga tidak lagi berhak atas bantuan iuran APBN. • Upaya Reaktivasi: Dinas Sosial baru berhasil melakukan reaktivasi terhadap sekitar 5.000 peserta (3%) melalui proses ground check data di lapangan. **3. Kebutuhan dan Realisasi Anggaran** • Beban Biaya vs. Iuran: Biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS di Kota Sorong mencapai

	Rp77 miliar, sedangkan iuran yang masuk dari semua sektor hanya Rp12,5 miliar. • Anggaran 2026: Pemerintah daerah telah menganggarkan Rp15 miliar untuk iuran penduduk. Secara perhitungan, anggaran ini masih mencukupi dan bahkan memungkinkan penambahan sekitar 14.000 peserta baru. • Tunggakan dan Kekurangan: Masih terdapat tagihan tahun sebelumnya sebesar Rp14 miliar yang belum terbayar, serta kekurangan anggaran sekitar Rp2,1 miliar untuk segmen ASN/PPPK. **4. Strategi Penguatan dan Inovasi Program** • Program Iuran 1% ASN: Sosialisasi kebijakan bagi ASN dan PPPK untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan (orang tua, mertua, atau anak ke-4) dengan iuran hanya 1% dari gaji pokok dan tunjangan tetap, yang dinilai lebih murah daripada daftar mandiri. • Program Pesiar (Petugas Desa/Kelurahan): Pemanfaatan agen di 10 kelurahan untuk memvalidasi data penduduk non-JKN dan membantu reaktivasi peserta secara langsung (“jemput bola”). • Skema Sharing Iuran: Tawaran kerja sama dengan pihak ketiga (seperti CSR perusahaan atau rumah sakit) untuk berbagi beban pembayaran iuran masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. • PKS Informasi Kepesertaan: Penandatanganan kerja sama agar masyarakat mendapatkan

	informasi yang lebih cepat jika kartu mereka dinonaktifkan. **5. Koordinasi Lintas Sektor dan Provinsi** • Sinergi OPD: Perlunya peran aktif distrik dan kelurahan dalam pemutakhiran data (aplikasi SIKS-NG) karena mereka yang paling mengetahui kondisi ekonomi warga. • Kolaborasi Provinsi (Forum SHEK): Pokja Sehat BPP menyarankan agar beban pembiayaan JKN dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui skema "keroyok bersama" berdasarkan variabel jumlah penduduk. • Fleksibilitas Regulasi: BPJS menyarankan agar jumlah kepesertaan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tidak "dikunci" pada angka tertentu, melainkan bersifat fleksibel mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.
Hasil Kegiatan	**Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS):** Telah dilakukan penandatanganan kerja sama mengenai pemberian informasi status kepesertaan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kota dapat mengakses dan menginformasikan kepada warga jika kartu JKN mereka nonaktif, sehingga warga bisa segera melakukan perbaikan data atau mendaftar mandiri. **Rencana Sosialisasi Iuran 1% bagi ASN:** Disepakati untuk mengumpulkan seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Sorong guna menyosialisasikan program pendaftaran anggota

	keluarga tambahan (orang tua, mertua, atau anak ke-4) dengan iuran hanya 1% dari gaji, yang dinilai lebih murah dan mudah dibandingkan pendaftaran mandiri. **Optimalisasi Program Pesiar:** Penguatan peran agen Pesiar (Petugas Desa/Kelurahan) di 10 kelurahan untuk melakukan validasi data terhadap penduduk yang belum memiliki JKN dan peserta yang nonaktif agar bisa direaktivasi secara langsung di lapangan. **Evaluasi dan Sinkronisasi Data Kemiskinan:** Dinas Sosial melaporkan hasil ground check terhadap sekitar 5.000 peserta yang telah berhasil direaktivasi dari total puluhan ribu peserta PBIJK yang nonaktif. Forum menekankan pentingnya peran operator kelurahan dalam pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG. **Kesepakatan Fleksibilitas Regulasi PKS:** Pihak Pemkot dan BPJS sepakat bahwa untuk Perjanjian Kerja Sama di tahun mendatang, jumlah kepesertaan tidak boleh “dikunci” pada angka maksimal tertentu. PKS harus bersifat fleksibel mengikuti dinamika perubahan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan di lapangan agar tidak terjadi hambatan administratif saat anggaran masih tersedia. **Rencana Koordinasi Tingkat Provinsi:**

	Muncul usulan strategis untuk membawa masalah pendanaan JKN ke Forum SHEK KDH (Kepala Daerah) agar ada kolaborasi pembagian beban anggaran antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota berdasarkan jumlah penduduk. **Pemetaan Anggaran:** Teridentifikasi status anggaran tahun 2026, di mana iuran penduduk (Jamkesda) sebesar Rp15 miliar masih mencukupi, namun terdapat kekurangan sekitar Rp2,1 miliar untuk segmen iuran ASN/PPPK yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan keuangan daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	**1. Sosialisasi Program Iuran 1% bagi ASN dan PPPK** Sekretaris Daerah (Sekda) menginstruksikan Bagian Protokol untuk segera menjadwalkan pertemuan khusus guna mengumpulkan seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Tujuannya adalah agar Kepala Cabang BPJS Kesehatan dapat menyosialisasikan manfaat pendaftaran anggota keluarga tambahan (orang tua, mertua, dan anak keempat) dengan skema iuran 1% yang dinilai lebih murah dan mudah dibandingkan kepesertaan mandiri. **2. Koordinasi Teknis Lintas OPD** Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong akan menindaklanjuti hasil forum ini dengan melakukan

	koordinasi teknis langsung kepada dinas-dinas terkait, yaitu: BPKAD dan BKPSDM: Terkait administrasi pemotongan iuran 1% bagi keluarga tambahan ASN. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disnaker, Bappeda, dan BP3OKP: Untuk menyinkronkan data dan strategi reaktivasi peserta yang nonaktif. Hasil koordinasi ini nantinya akan dilaporkan kembali kepada Sekda sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. **3. Penguatan Program Pesiar di Tingkat Kelurahan** Optimalisasi peran agen Pesiar (Petugas Desa/Kelurahan) di 10 kelurahan yang sudah ditunjuk. Agen-agen ini akan dibekali data peserta nonaktif untuk melakukan validasi lapangan (ground check) dan membantu pendaftaran atau pemutakhiran data (updating desil) masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke kantor BPJS. **4. Percepatan Ground Check dan Pemutakhiran Data** Dinas Sosial bersama operator kelurahan akan melanjutkan proses verifikasi data terhadap sisa peserta PBIJK yang nonaktif (sekitar 61.000 jiwa) melalui aplikasi SIKS-NG. Fokusnya adalah memastikan penduduk miskin atau yang membutuhkan layanan darurat segera masuk kembali

	ke dalam database penerima bantuan iuran (PBI) atau Jamkesda. **5. Eskalasi ke Forum SHEK (Tingkat Provinsi)** Muncul rencana strategis untuk membawa isu beban pembiayaan JKN ke Forum SHEK KDH (Kepala Daerah) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tujuannya adalah mendorong adanya skema “keroyok bersama” atau kolaborasi anggaran antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong berdasarkan variabel jumlah penduduk. **6. Penyesuaian Regulasi Perjanjian Kerja Sama (PKS)** Untuk PKS tahun mendatang, disepakati bahwa klausul mengenai jumlah peserta tidak boleh “dikunci” pada angka maksimal tertentu. PKS akan dibuat lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika populasi dan kebutuhan layanan kesehatan di lapangan sepanjang anggaran masih tersedia. **7. Penjajakan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga (CSR dan Baznas)** Pemerintah Kota dan BPJS akan menjajaki kemungkinan pemanfaatan dana CSR dari badan usaha dan dana dari Baznas melalui skema sharing iuran untuk membantu meringankan beban APBD dalam menanggung iuran masyarakat kurang mampu.

Dokumentasi	  

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD dalam rangka Kunjungan Kerja dan Pendampingan Persiapan Akreditasi pada RSUD Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa-Jum'at, 11-14 Agustus 2026 RSUD Kabupaten Raja Ampat
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua.

	• Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Rumah Sakit Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu lokus PHTC di Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan SHEK Misi Papua Sehat dalam rangka percepatan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit serta peningkatan tipe rumah sakit sesuai dengan RAPPP.
Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Sehat BPP PBD (drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, MPH., SpPM). • Direktur RSUD Kabupaten Raja Ampat. • Tim Akreditasi RSUD Kabupaten Raja Ampat.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	• Percepatan peningkatan tipe rumah sakit. • Pilihan layanan unggulan. • Progres PHTC. • Rencana akreditasi rumah sakit.
Hasil Kegiatan	• Dokumentasi. • Laporan. • Rencana tindak lanjut (RTL).
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Perlunya penyesuaian segera terhadap rencana strategis rumah sakit dengan ketentuan Permenkes Nomor 12 Tahun 2025. • Perlu dilakukan evaluasi untuk pengembangan rumah sakit ke tahap selanjutnya. • Perlu diperhatikan strategi pengembangan rumah sakit terkait dengan rencana pengembangan SDMK.

Dokumentasi	  

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD dalam rangka Persiapan Pendampingan Akreditasi RSU Pratama Tambrauw
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu, 22 Agustus 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya.
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Latar belakang utama pelaksanaan diskusi pendampingan ini adalah adanya **krisis tata kelola multidimensi di RSUD Tambrauw** yang terjadi pada masa transisi kepemimpinan kepada Direktur baru, dr. Resvytiranda, yang baru dilantik pada 28 Juli 2026. Kondisi-kondisi krusial yang melatarbelakangi pertemuan ini meliputi: • **Mati Surat Izin Operasional (SIO) dan Kendala Akun Sistem OSS**: SIO RSUD Tambrauw telah mati sejak 24 April 2026 setelah direktur sebelumnya meninggal dunia. Pengurusannya terhambat karena kesalahan input pada sistem OSS, yaitu terdaftar sebagai perusahaan umum,

	bukan BLUD. Selain itu, mantan direktur lain (Marius) diduga mempersulit proses pemulihan akun OSS dengan meminta uang pribadi sebesar Rp100 juta untuk memberikan password akun tersebut. Tanpa SIO yang valid secara sistem, kerja sama dengan BPJS tidak dapat berjalan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pemasukan utama rumah sakit. • **Masalah Infrastruktur dan Fasilitas**: Rumah sakit menghadapi kondisi fisik bangunan yang sangat memprihatinkan, seperti kamar jenazah yang letaknya berhadapan langsung dengan ruang persalinan, ruang operasi (OK) yang mengalami kebocoran di bagian tengah dan AC sentral yang mati total, serta ketiadaan tabung oksigen sejak tahun 2021. Selain itu, sistem air bersih rusak, tagihan listrik menunggak hingga Rp50 juta, sementara anggaran yang tersedia hanya Rp33 juta, serta hilangnya aset penting seperti komputer untuk sistem ASPAK dan dua buah aki genset senilai puluhan juta rupiah. • **Kekacauan Manajemen Keuangan dan SDM**: Direktur baru tidak menerima laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) maupun data inventaris alkes dari manajemen lama. Dari sisa dana operasional Otsus sebesar Rp4 miliar, sebagian besar habis untuk membayar insentif dokter spesialis. Terdapat pula perselisihan terkait regulasi pembayaran uang lembur perawat yang selama ini tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, serta kekosongan tenaga esensial seperti analis laboratorium dan rekam medis.

	• **Keterlambatan Sistem Perencanaan Daerah (SIPD)**: Kabupaten Tambrauw terlambat dalam melakukan input data dari sistem SIPD ke SIPPP. Hal ini berisiko menghambat penetapan APBD daerah dan memperlambat pencairan anggaran operasional rumah sakit. Melihat kompleksitas hambatan regulasi, anggaran, dan operasional tersebut, dr. Resvytiranda berinisiatif meminta bantuan asistensi dari BPP. Pertemuan koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk merumuskan strategi taktis sebelum tim BPP melakukan kunjungan lapangan secara langsung pada awal September guna memfasilitasi pertemuan dengan Bupati, PTSP, BKPSDM, dan Dinas Kesehatan setempat agar RSUD Tambrauw dapat segera menyelesaikan SIO, bermitra dengan BPJS, beralih status menjadi BLUD, serta mempersiapkan akreditasi untuk naik kelas menjadi Rumah Sakit Tipe D.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	**1. Sinkronisasi (Penyelarasan Program dan Anggaran)** Menyelaraskan Perencanaan dengan Dokumen Induk: Memastikan dokumen perencanaan jangka menengah/panjang RSUD Tambrauw selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) agar usulan program memiliki dasar pendanaan Otsus yang sah. Mengatasi Hambatan Sistem Perencanaan Daerah: Membantu mengurai hambatan keterlambatan input data Kabupaten Tambrauw dari sistem SIPD ke SIPPP agar proses penetapan APBD tidak terhambat, yang

	berisiko menunda pencairan anggaran operasional rumah sakit. Menghubungkan dengan Program Prioritas Nasional: Membantu menjembatani usulan RSUD Tambrauw untuk mendapatkan dukungan program prioritas nasional (Asta Cita), seperti fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Kementerian ESDM untuk kemandirian energi. **2. Harmonisasi (Penyelarasan Regulasi dan Tata Kelola)** Mendorong Transisi ke BLUD: Membimbing RSUD Tambrauw untuk beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini krusial agar rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sendiri, termasuk dalam pembiayaan dokter spesialis dari DAK nonfisik dan penataan insentif yang sah secara hukum. Penyelesaian Kebuntuan Regulasi SIO (Surat Izin Operasional): Membantu penyelesaian masalah administrasi pengurusan SIO melalui OSS yang salah input agar SIO manual/sementara dapat diterbitkan demi kelancaran kerja sama dengan BPJS. Harmonisasi Aturan Internal SDM: Memfasilitasi penyusunan regulasi daerah/perjanjian kerja sama (PKS) terkait aturan jam kerja, pembagian shift, dan mekanisme lembur tenaga medis agar adil dan memiliki dasar hukum yang kuat. **3. Evaluasi (Pemantauan Pelaksanaan Program)**

	Mengevaluasi Kesiapan Akreditasi: Mengevaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit kelas D sesuai regulasi Kementerian Kesehatan serta memastikan indikator mutu nasional (INM) dan laporan insiden keselamatan pasien (IKP) diisi secara disiplin sebagai syarat akreditasi. Evaluasi Sarana dan Prasarana (ASPAK): Mendorong pelaksanaan stok opname secara menyeluruh terhadap inventaris alat kesehatan (alkes) yang tidak memiliki berita acara serah terima guna diinput ke dalam sistem ASPAK. **4. Koordinasi dan Advokasi (Mengurai Sumbatan dengan Pemangku Kepentingan)** Menjadi Jembatan Lintas Sektor: Mengkoordinasikan pertemuan taktis di tingkat daerah dengan melibatkan Bupati, Dinas Kesehatan, PTSP, BKPSDM, dan Bagian Hukum untuk memecahkan hambatan operasional rumah sakit secara kolektif. Melakukan Advokasi Tingkat Pusat: Jika hambatan bersumber dari kementerian atau lembaga di tingkat pusat, misalnya terkait kepastian anggaran PHTC di Kementerian Kesehatan, BPP bertugas melakukan advokasi langsung agar hambatan tersebut dapat dieliminasi. Secara keseluruhan, tujuan akhir Pokja Sehat BPP adalah memastikan RSUD Tambrauw dapat segera beroperasi secara legal dan mandiri, terakreditasi dengan baik, serta mampu memberikan pelayanan

	kesehatan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Tambrauw.
Peserta Kegiatan	• Direktur RSU Tambrauw dan Tim. • Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya (drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, MPH., SpPM dan dr. Alouisius Feliciano Uspessy)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	**1. Hambatan Administrasi, Legalitas SIO, dan Sistem OSS** • Mati Surat Izin Operasional (SIO): SIO RSUD Tambrauw telah mati sejak 24 April 2026. Hal ini menjadi hambatan utama karena tanpa SIO yang valid, rumah sakit tidak dapat melakukan kerja sama dengan BPJS. • Kesalahan Input Sistem OSS: Pengurusan SIO baru terhambat karena direktur sebelumnya salah menginput data rumah sakit pada sistem OSS, di mana RSUD Tambrauw terdaftar sebagai “perusahaan umum”, bukan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). • Kendala Akun OSS oleh Mantan Direktur: Mantan direktur (Marius) menguasai akun email dan password OSS yang terdaftar atas NPWP-nya. Ia mempersulit proses transisi dengan meminta uang pribadi sebesar Rp100 juta agar mau melakukan verifikasi foto (face recognition/OTP) di sistem OSS. • Skenario SIO Manual: Sebagai solusi jangka pendek, disepakati koordinasi dengan Dinas

	PTSP untuk menerbitkan SIO manual terlebih dahulu agar dapat dilakukan visitasi oleh BPJS pada bulan September, sementara perbaikan sistem OSS tetap diproses untuk kebutuhan akreditasi. **2. Krisis Infrastruktur, Fasilitas, dan Kesalahan Tata Letak (Layout)** • Tata Letak Kamar Jenazah yang Tidak Layak: Kamar jenazah diletakkan berhadapan langsung dengan ruang persalinan. Selain tidak etis dan berpotensi memicu trauma pasien, kamar jenazah juga tidak memiliki saluran pembuangan limbah yang berfungsi. • Kerusakan Ruang Operasi (OK) dan Sanitasi: Ruang operasi mengalami kebocoran parah tepat di bagian tengah dan sistem AC sentralnya mati total. Selain itu, instalasi air bersih rumah sakit sempat rusak serta mesin IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak berfungsi. • Ketiadaan Oksigen dan Kehilangan Aset: Rumah sakit tidak memiliki tabung oksigen sejak tahun 2021 meskipun instalasi di ruang rawat inap sudah terpasang. Beberapa aset penting juga dilaporkan hilang, seperti komputer untuk sistem ASPAK dan dua buah aki genset senilai puluhan juta rupiah. **3. Kekacauan Keuangan, Aset, dan Operasional** • Nihilnya Laporan Keuangan: Direktur baru tidak menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ)

	keuangan maupun data inventaris barang/alkes dari manajemen lama saat pelantikan. • Tunggakan Listrik: Rumah sakit menunggak tagihan listrik hingga Rp50 juta untuk periode Januari–Agustus, sementara anggaran DPA yang tersedia hanya Rp33 juta. • Penggunaan Ambulans yang Menyimpang: Ambulans yang seharusnya bersiaga untuk rujukan darurat 24 jam sering kali disalahgunakan oleh staf untuk kepentingan pribadi, namun kini telah ditertibkan dan hanya dapat digunakan untuk keperluan rujukan. **4. Masalah Manajemen SDM dan Regulasi Internal** • Tuntutan Lembur Perawat tanpa Dasar Regulasi: Staf perawat menuntut pembayaran uang lembur kumulatif sejak Januari sebesar Rp90 juta. Nilai tersebut tidak sesuai dengan anggaran DPA yang hanya Rp30 juta. Cara perhitungannya juga tidak memiliki dasar hukum formal, melainkan hanya berdasarkan kebiasaan masa lalu. • Pengaturan Jam Kerja Dokter Spesialis: Terdapat perdebatan mengenai jam kerja dokter spesialis. Para dokter spesialis menginginkan pola kerja 2 minggu di tempat dan 2 minggu libur/off, sementara direktur menginginkan kedisiplinan yang lebih tinggi karena operasional rumah sakit sering terganggu saat dokter spesialis tidak berada di tempat. • Kedisiplinan Pegawai: Penertiban jam kerja staf dilakukan melalui kewajiban apel pagi pukul 07.45 WIT. Direktur baru juga bersikap tegas dengan memblokir gaji bagi staf yang tidak masuk kerja.

	• Kekosongan Tenaga Esensial: Rumah sakit mengalami kekurangan tenaga rekam medis dan analis laboratorium. • Sengketa Insentif Direktur: Dinas Kesehatan melarang direktur baru menerima insentif sebagai dokter pelayanan (fungsional) dan memintanya memilih salah satu, yaitu hanya menerima gaji/insentif direktur yang nilainya jauh lebih kecil, yang memicu protes dari dr. Resvytiranda. **5. Strategi Anggaran, Transisi BLUD, dan Penyelarasan SIPD** • Keterlambatan SIPD: Kabupaten Tambrauw terlambat menginput data ke sistem perencanaan SIPPP dari SIPD, yang berisiko menunda penetapan APBD dan pencairan anggaran operasional rumah sakit. • Dorongan Menuju BLUD: Tim BPP menekankan pentingnya RSUD Tambrauw segera beralih menjadi BLUD agar memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, seperti menggunakan pendapatan dari BPJS untuk menutupi kebutuhan operasional, membeli obat, dan mengatur insentif pegawai secara adil. • Kemandirian Energi: Dibahas usulan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Kementerian ESDM untuk mengatasi masalah kelistrikan rumah sakit. **6. Persiapan Akreditasi dan Rekam Medis Elektronik (RME)**

	• Kepatuhan Indikator Mutu: Rumah sakit diwajibkan mengisi Indikator Mutu Nasional (INM) dan Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) secara rutin pada aplikasi sebagai salah satu persyaratan akreditasi. • Uji Coba RME: Direncanakan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) menggunakan sistem Kansa atau Simgos untuk memudahkan bridging data dengan BPJS dan program Satu Sehat Kementerian Kesehatan. **7. Rencana Pendampingan Lapangan oleh BPP (September 2026)** • Disepakati tim BPP akan melakukan kunjungan ke Tambrauw untuk pendampingan langsung pada awal September. • Agenda hari pertama direncanakan berupa rapat pleno bersama seluruh pemangku kepentingan daerah pada pagi hari, dilanjutkan dengan sesi dengar pendapat bersama tim kerja internal rumah sakit secara tertutup pada siang hari. • BPP meminta direktur untuk memastikan kehadiran perwakilan dari BKPSDM, Bagian Hukum Setda, Dinas Kesehatan, dan Bupati guna menyelesaikan sengketa regulasi jam kerja, aturan lembur, serta kepastian insentif secara kolektif.
Hasil Kegiatan	**1. Solusi Taktis untuk Legalitas SIO dan Kerja Sama BPJS** • Penerbitan SIO Manual Jangka Pendek: Sebagai langkah darurat, disepakati bahwa Dinas PTSP akan membantu menerbitkan Surat Izin Operasional (SIO) secara manual dalam waktu

	satu minggu setelah berkas dimasukkan. SIO manual ini digunakan agar BPJS dapat melakukan visitasi kerja sama pada pertengahan September 2026. • Penyelesaian Akun OSS Jangka Panjang: Meskipun SIO manual diterbitkan, perbaikan kesalahan input data pada sistem OSS tetap harus diselesaikan demi kelancaran proses akreditasi rumah sakit. • Intervensi Bupati terkait Akun OSS: Bupati Tambrauw akan didorong untuk memanggil mantan direktur (Marius) yang menguasai akun OSS dan meminta uang pribadi Rp100 juta agar akun tersebut dapat diserahkan secara hukum tanpa harus membayar tuntutan tersebut. **2. Jadwal dan Struktur Agenda Pendampingan Lapangan BPP** Disepakati bahwa tim Pokja Sehat BPP akan melakukan kunjungan lapangan langsung ke RSUD Tambrauw pada awal September 2026. Kunjungan ini dirancang dengan agenda terstruktur sebagai berikut: • Hari Pertama (Pagi): Rapat pleno bersama seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk Bupati, Dinas Kesehatan, PTSP, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda. • Hari Pertama (Siang): Sesi dengar pendapat (hearing) tertutup bersama seluruh tim kerja internal rumah sakit untuk memetakan permasalahan dari sudut pandang staf.

	• Hari Kedua: Diskusi perumusan arah strategis rumah sakit, perencanaan anggaran, dan penutupan simpul-simpul hambatan. **3. Pembagian Tugas Persiapan untuk Manajemen RSUD Tambrauw** Sebelum tim BPP tiba pada awal September, Direktur RSUD Tambrauw dan tim perencanaan diminta untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sebagai basis data pendampingan, yaitu: • Melakukan Stok Opname Alkes: Melakukan inventarisasi fisik secara mandiri terhadap seluruh alat kesehatan yang tidak memiliki berita acara serah terima guna segera dicatatkan ke dalam sistem ASPAK. • Menyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Melakukan evaluasi terhadap SPM rumah sakit kelas D yang belum terpenuhi dan menyusun laporannya. • Melengkapi Data Penunjang: Menyiapkan data rata-rata kunjungan pasien bulanan/mingguan, daftar penyakit terbanyak (10 besar penyakit), serta mengirimkan dokumen digital master plan rumah sakit kepada tim BPP. • Sertifikasi Tanah ke BPN: Merencanakan pengurusan sertifikat kepemilikan lahan rumah sakit ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah memastikan pelepasan tanah adat telah selesai dan dibayar. • Menyempurnakan Proposal dan Renstra: Menyusun profil SDM yang riil, saat ini berjumlah 60 staf, menyusun draf Rencana Strategis

	(Renstra) 5 tahun yang dilengkapi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan (SWOT), serta proyeksi kebutuhan anggaran jangka panjang. • Menjajaki Sistem RME: Melakukan komunikasi awal dengan penyedia Rekam Medis Elektronik (RME) Kansa atau menggunakan Simgos milik Kementerian Kesehatan. **4. Strategi Penyelesaian Masalah Internal SDM** • Penyelesaian Aturan Kerja Dokter Spesialis: Mengagendakan pembahasan bersama BKPSDM dan Bagian Hukum untuk menetapkan regulasi jam kerja dokter spesialis yang adil, seperti pola 3 minggu kerja dan 1 minggu off, serta menuangkannya ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pakta integritas yang memiliki dasar hukum kuat. • Penyelesaian Sengketa Lembur Perawat: Aturan lembur perawat akan dirumuskan ulang dalam bentuk peningkatan nominal insentif/tambahan penghasilan kumulatif di dalam regulasi Bupati, alih-alih menggunakan perhitungan lembur biasa yang tidak sesuai dengan pagu DPA. • Kepastian Insentif Direktur: Masalah larangan penumpukan insentif direktur dan dokter pelayanan akan diselesaikan dengan merujuk pada Permendagri tentang TPP/tugas tambahan ASN fungsional.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	**1. Penyelesaian Legalitas dan Administrasi Mendesak (Jangka Pendek)**

	• Penerbitan SIO Manual: Manajemen RSUD Tambrauw harus segera berkoordinasi dengan Dinas PTSP untuk menyerahkan berkas agar Surat Izin Operasional (SIO) manual dapat diterbitkan dalam waktu satu minggu. SIO manual ini sangat krusial agar visitasi dan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dilaksanakan pada pertengahan September 2026. • Penyelesaian Hambatan Akun OSS: Direktur meminta Bupati Tambrauw secara tegas memanggil mantan direktur (Marius) yang menguasai akun OSS untuk menyerahkan email, password, dan melakukan verifikasi wajah/OTP tanpa harus membayar tuntutan uang pribadi sebesar Rp100 juta. Perbaikan sistem OSS ini harus berjalan paralel demi kelancaran proses akreditasi rumah sakit. • Advokasi Anggaran Pusat (Kementerian Kesehatan): Membangun komunikasi aktif dengan Direktorat Layanan Rujukan Kementerian Kesehatan untuk memastikan posisi RSUD Tambrauw dalam program PHTC (Percepatan Peningkatan Kelas Rumah Sakit) agar dapat mengakses dukungan anggaran pembangunan dari pusat. **2. Agenda Kunjungan Lapangan dan Pendampingan BPP** Pendampingan langsung oleh tim Pokja Sehat BPP direncanakan pada awal September, diusulkan tanggal 2–4 September, diselaraskan dengan jadwal kedatangan dokter spesialis baru serta agenda ujian

	profiling ASN direktur. Agenda taktis kunjungan dirancang sebagai berikut: • Hari Pertama (Pagi): Melaksanakan rapat pleno bersama seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk Bupati, Dinas Kesehatan, PTSP, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda. • Hari Pertama (Siang): Sesi dengar pendapat (hearing) tertutup bersama seluruh staf internal rumah sakit untuk memetakan permasalahan. • Hari Kedua: Merumuskan arah strategis rumah sakit, evaluasi anggaran, dan penutupan simpul-simpul hambatan operasional secara kolektif. 3. Tugas Persiapan Internal bagi Manajemen RSUD Tambrauw Sebelum tim BPP tiba di lapangan pada awal September, Direktur dan tim perencanaan rumah sakit harus menyelesaikan beberapa tugas penyiapan data: • Stok Opname Alkes dan ASPAK: Melakukan inventarisasi fisik secara mandiri terhadap seluruh alat kesehatan yang belum memiliki berita acara serah terima, kemudian mencatatkan datanya secara lengkap ke dalam sistem ASPAK. • Evaluasi Laporan SPM: Melakukan evaluasi mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit kelas D yang belum terpenuhi dan menyusun laporannya. • Penyediaan Data Kunci Layanan: Menyiapkan data rata-rata kunjungan pasien mingguan/bulanan, kapasitas tempat tidur yang terpakai, draf profil SDM yang saat ini berjumlah 60 staf, daftar 10

	penyakit terbanyak, serta mengirimkan dokumen digital master plan rumah sakit kepada BPP. • Sertifikasi Lahan ke BPN: Merencanakan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah RSUD ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah memastikan dokumen pelepasan tanah adat telah selesai dan dibayar. • Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra): Menyusun draf Renstra 5 tahun menuju tahun 2029 yang dilengkapi dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan (SWOT) serta rencana anggaran pematangan lahan rumah sakit. **4. Penataan SDM dan Regulasi Internal Rumah Sakit** • Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Pakta Integritas: Menyusun dokumen PKS baru dan pakta integritas untuk mengatur jam kerja serta kedisiplinan staf, termasuk menyepakati pola kerja dokter spesialis secara adil, seperti opsi 3 minggu kerja di tempat dan 1 minggu off. • Harmonisasi Regulasi Lembur dan TPP: BKPSDM dan Bagian Hukum Setda harus dihadirkan dalam rapat pendampingan guna merumuskan dasar regulasi daerah yang sah terkait pemberian tambahan penghasilan (kumulatif lembur) bagi perawat agar tidak berbenturan dengan aturan keuangan daerah dan pagu DPA. • Rekrutmen Tenaga IT: Merekrut minimal satu orang tenaga IT profesional yang andal guna mengelola sistem informasi rumah sakit dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

	• Uji Coba Rekam Medis Elektronik (RME): Menghubungi penyedia platform RME Kansa atau menjajaki opsi Simgos milik Kementerian Kesehatan. **5. Rekomendasi Jangka Panjang: Transisi Menuju BLUD** Mendorong percepatan pengalihan status RSUD Tambrauw menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status BLUD, rumah sakit akan memiliki fleksibilitas dalam mengelola pendapatannya sendiri, termasuk dana BPJS, untuk membiayai operasional, pengadaan obat, serta mengatur insentif pegawai secara mandiri dan adil.
Dokumentasi	 

3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Introduction dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 12 Agustus 2026, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.

IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Kegiatan dilaksanakan sebagai pertemuan awal BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat dalam rangka memperkenalkan tugas dan fungsi BPP, khususnya pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan SHEK bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, termasuk rencana koordinasi dan pembahasan bersama Bupati Raja Ampat serta perangkat daerah terkait.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memperkenalkan tugas dan fungsi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya serta agenda pelaksanaan SHEK di Kabupaten Raja Ampat. • Menyampaikan rencana pelaksanaan koordinasi dan pembahasan bersama Bupati Raja Ampat serta perangkat daerah terkait. • Membangun komunikasi awal dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat sebagai bagian dari pelaksanaan SHEK. • Memperoleh dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat sebagai bahan analisis dan evaluasi BPP.
Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Helena Trivona

	Tuririday, S.Si., M.Si. dan Dea Anggie Varena, S.Kom.). • Anggota Pokja Papua Produktif BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Herman Wafom Tubur, S.P., M.Si.). • Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Pengenalan tugas dan fungsi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam pelaksanaan SHEK. • Penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan SHEK BPP bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. • Pembahasan rencana pertemuan dan koordinasi bersama Bupati Raja Ampat serta perangkat daerah terkait. • Penyampaian kebutuhan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam pelaksanaan SHEK.
Hasil Kegiatan	• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat menyambut baik rencana pelaksanaan SHEK BPP dan menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaannya. • Terbangunnya komunikasi dan koordinasi awal antara BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat.

	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat akan mendukung penyediaan dokumen perencanaan yang diperlukan sebagai bahan analisis dan evaluasi BPP.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menindaklanjuti rencana pertemuan dan koordinasi bersama Bupati Raja Ampat serta perangkat daerah terkait. • Meminta dan melakukan analisis terhadap dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat sebagai bahan pelaksanaan SHEK. • Melanjutkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat dalam rangka pelaksanaan SHEK bidang pendidikan.
Dokumentasi	 

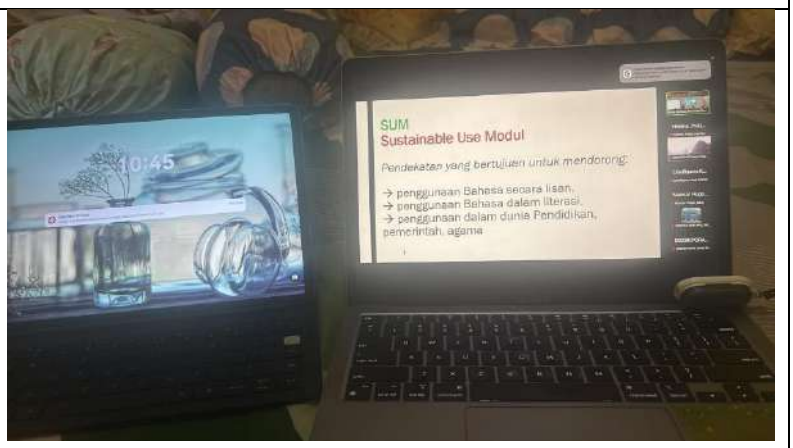
	

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Rapat Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 di Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 24 Agustus 2026 Virtual/Daring (Zoom Meetings)
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Di Tanah Papua terdapat 478 bahasa daerah, namun sebagian besar belum terdokumentasikan secara optimal, bahkan dokumentasi yang tersedia masih kurang dari 20%. Upaya pelestarian bahasa daerah

	dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Saat ini, upaya pelestarian juga mulai dilakukan melalui pembelajaran di sekolah. Diperlukan langkah strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pelestarian bahasa daerah yang akan dibahas dalam Kongres Bahasa Daerah di Jayapura pada bulan Oktober 2026. Dalam rangka persiapan kongres tersebut, dilakukan pengelompokan pokok-pokok pikiran yang diawali dengan brainstorming mengenai pelestarian dan status bahasa daerah di Papua oleh empat narasumber, salah satunya Rektor Universitas Papua, Prof. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Menghadiri rapat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas BPP dalam melakukan SHEK terhadap pokok-pokok pikiran dan materi yang disampaikan dalam rangka penyusunan bahan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si. dan Dea Anggie Varena, S.Kom.). • Kepala Balai Bahasa, Kemendikdasmen RI. • Pemerintah Provinsi Papua, Asisten I Bidang Pemerintahan. • Kepala Sekolah di wilayah Kota Jayapura. • Rektor Universitas Papua. • Bapak Jems Modow. • HILS – LSM asing yang bergerak di bidang bahasa.

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Pemaparan mengenai status bahasa daerah di Papua. • Pembahasan status dan indikator bahasa daerah di Papua oleh Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen RI. • Perumusan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Kongres Bahasa Daerah.
Hasil Kegiatan	Berdasarkan hasil diskusi, dirumuskan 6 (enam) pokok pikiran untuk dibahas dalam Kongres Bahasa Daerah, yaitu: • Melakukan sinkronisasi rencana lokal dengan *Regional Road Map for Multilingual Education in Southeast Asia*. • BGTK melanjutkan penyusunan materi kokurikuler dan merencanakan pendampingan untuk sekolah. • Menyusun modul pelatihan kokurikuler berbasis audio-video dengan metode TPR yang dapat diadaptasi secara lokal. • Melakukan pemetaan ekosistem kolaborasi bahasa sebelum pembentukan forum koordinasi. • Merencanakan pembangunan repositori digital bahasa Papua, termasuk menentukan pihak-pihak yang terlibat. • Menyusun draf regulasi terkait penggunaan bahasa daerah di ruang publik dan kegiatan resmi.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Melanjutkan perumusan oleh tim dan menyiapkan strategi pembahasan pokok-pokok pikiran tersebut

	sebagai bahan Kongres Bahasa Daerah pada bulan Oktober 2026.
Dokumentasi	

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama Kanwil DJBC Khusus Papua terkait Pendaftaran PKN STAN 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 26 Agustus 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan akses dan partisipasi putra-putri Papua dalam pendidikan kedinasan, khususnya melalui

	seleksi PKN STAN Tahun 2026. Koordinasi dengan Kanwil DJBC Khusus Papua diperlukan untuk memperoleh informasi terkait tahapan, persyaratan, dan mekanisme seleksi serta mendorong penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan peserta didik di Papua Barat Daya. Peningkatan akses dan kesiapan generasi muda Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga menjadi bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia Papua serta mendukung peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagaimana diarahkan dalam RIPPP dan RAPPP.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan SHEK dan koordinasi terkait pelaksanaan seleksi PKN STAN Tahun 2026. • Memperoleh informasi mengenai tahapan dan persyaratan seleksi PKN STAN sebagai bahan penyebarluasan informasi kepada putra-putri Papua Barat Daya. • Mendorong peningkatan akses dan partisipasi putra-putri Papua dalam pendidikan kedinasan. • Memperkuat sinergi BPP PBD dengan Kanwil DJBC Khusus Papua dalam mendukung pengembangan SDM Papua.
Peserta Kegiatan	• Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si. dan Dea Anggie Varena, S.Kom.). • Perwakilan Kanwil DJBC Khusus Papua.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi

Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	• Informasi mengenai pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN Tahun 2026. • Tahapan dan persyaratan seleksi PKN STAN Tahun 2026. • Peluang afirmasi bagi putra-putri Papua untuk mengikuti pendidikan kedinasan. • Pentingnya penyebarluasan informasi dan persiapan peserta sejak jenjang SMA. • Dukungan Kanwil DJBC Khusus Papua dalam memberikan pembekalan dan bahan persiapan seleksi PKN STAN.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya koordinasi antara BPP PBD melalui Pokja Papua Cerdas dengan Kanwil DJBC Khusus Papua terkait seleksi PKN STAN Tahun 2026. • Diperolehnya informasi mengenai tahapan dan persyaratan seleksi PKN STAN Tahun 2026. • Kanwil DJBC Khusus Papua menyampaikan dukungan melalui sharing session, bimbingan, dan bahan persiapan bagi calon peserta sebelum pelaksanaan seleksi tertulis. • BPP PBD turut menyebarluaskan informasi mengenai seleksi PKN STAN Tahun 2026 melalui media sosial serta melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan/sekolah di Papua Barat Daya untuk memperluas jangkauan informasi kepada calon peserta.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mendorong penyebarluasan informasi mengenai peluang dan tahapan seleksi PKN STAN kepada putra-putri Papua Barat Daya melalui media sosial,

	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, serta satuan pendidikan/sekolah. • Menindaklanjuti koordinasi dengan Kanwil DJBC Khusus Papua dalam mendukung persiapan calon peserta seleksi PKN STAN. • Mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya untuk merencanakan program persiapan/matrikulasi bagi peserta didik dan lulusan SMA/sederajat yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan, sebagai upaya membangun kesiapan peserta sejak awal. • Mendorong agar program persiapan tersebut mencakup pembekalan akademik dan informasi seleksi, sehingga putra-putri Papua Barat Daya dapat memanfaatkan peluang pendidikan tinggi dan afirmasi secara lebih optimal.
Dokumentasi	 

3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Audiensi BPP bersama Kementerian ESDM dalam Rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Dukungan Sektor Energi terhadap Percepatan Pembangunan Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 5 Agustus 2026 Kantor Kementerian ESDM, Jakarta
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Ketersediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Papua, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan

	listrik masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan kecil dan terluar. Kementerian ESDM melalui program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu TA 2026 mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur energi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua Barat Daya, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antara BPP dengan Kementerian ESDM terkait dukungan sektor energi, khususnya dalam rencana pembangunan PLTS Terpadu TA 2026.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait dukungan sektor energi dalam percepatan pembangunan Papua. • Membahas peluang dan rencana pembangunan PLTS Terpadu TA 2026 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Papua Barat Daya. • Memperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan PLTS, mulai dari perencanaan, pengadaan, pembangunan, hingga proses hibah dan kerja sama operasi (KSO) dengan Pemerintah Daerah dan PLN.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • BPP Perwakilan Provinsi lainnya. • Perwakilan Kementerian ESDM.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif

Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan terkait energi baru dan energi terbarukan serta dukungan sektor energi terhadap percepatan pembangunan Papua. • Pembahasan mengenai rencana pengadaan dan pembangunan PLTS Terpadu TA 2026. • Pembahasan tahapan pembangunan PLTS Terpadu, termasuk perencanaan, pengadaan, pembangunan, serta proses hibah dan KSO dengan Pemerintah Daerah dan PLN. • Koordinasi dukungan dan tindak lanjut pembangunan PLTS Terpadu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi di Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi terkait dukungan sektor energi, khususnya pembangunan PLTS Terpadu TA 2026, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Menindaklanjuti proses pembangunan PLTS Terpadu TA 2026 melalui koordinasi lebih lanjut antara BPP, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait.
Dokumentasi	

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama Kabid Transmigrasi – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat, 7 Agustus 2026, di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menandai transformasi fundamental dalam tata kelola pembangunan di Tanah Papua. Sebagai Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB),

	Papua Barat Daya memiliki mandat strategis untuk memperpendek rentang kendali (span of control) guna memastikan pelayanan publik dan akselerasi kesejahteraan menjangkau wilayah terpencil. Dalam kerangka ini, kebijakan transmigrasi mengalami reposisi paradigma secara radikal, yaitu penghentian total migrasi dari luar Papua dan transisi penuh menuju Program Transmigrasi Lokal 100%. Kebijakan ini menempatkan Orang Asli Papua (OAP) dan para pemilik hak ulayat sebagai subjek utama pembangunan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Kawasan transmigrasi di Kabupaten Sorong kini terintegrasi dalam 45 Kawasan Prioritas Nasional, yang secara langsung mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian pangan, salah satunya disinergikan dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Rakyat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PSN Cetak Sawah Rakyat berhadapan dengan kompleksitas isu lokal, mulai dari klaim hak ulayat atas lahan pertanian, resistensi terhadap perubahan pola tanam masyarakat adat, hingga minimnya keterpaduan infrastruktur irigasi dan jaringan jalan tani. Secara fiskal, keberlanjutan program didukung melalui skema dana “Trans Gotong Royong” (Tugas Pembantuan/TP APBN 2025) dan DIPA Kemnaker 2025. Namun, optimalisasi program dan penyelesaian dinamika lapangan sangat bergantung pada keterpaduan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus

	1,25% (Block Grant) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam kerangka Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Oleh karena itu, penyelenggaraan SHEK menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan kebijakan makro dengan realitas teknis dan sosial di lapangan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Penyelenggaraan SHEK ini bertujuan untuk menjembatani kebijakan RAPPP dan agenda PSN dengan kondisi teknis dan sosial di lapangan guna mewujudkan Misi Papua Produktif. Sasaran strategis kegiatan meliputi: • **Evaluasi Kewilayahan dan Pemetaan Masalah PSN**: Melakukan asesmen mendalam di kawasan Klamono-Saigun (10 distrik dan 45 kampung) terkait tingkat pemberdayaan OAP, pemenuhan SPM, serta inventarisasi hambatan lapangan pada lokasi Cetak Sawah Rakyat. • **Akselerasi Kesiapan Dokumen dan Status Lahan**: Memfinalisasi dokumen teknis, tata ruang, serta kesepakatan pelepasan hak ulayat di lokasi strategis Segun dan Klamono (Klawosom) demi kepastian hukum eksekusi fisik 2025. • **Integrasi Infrastruktur Pertanian dan Layanan Dasar**: Menyelaraskan cetak sawah baru dengan jaringan irigasi sekunder/tersier, jalan usaha tani, serta fasilitas kesehatan primer yang didanai DTI dan Dana Otsus. • **Mitigasi Kendala Logistik dan Pendampingan Tanam**: Merumuskan solusi atas hambatan rantai pasok hasil pertanian serta keterbatasan kapasitas teknis budidaya padi sawah bagi OAP.

Peserta Kegiatan	• Kabid Bidang Transmigrasi, Dinas Transnakertrans ESDM PBD. • Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya (Herman Wafom Tubur, S.P., M.Si. dan Alberd Berhad Duwith, MT.) • Pokja Papua Polhukam/Damai (Virginus Senau Air Turot, B.Sc.)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	**1. Sinkronisasi (Alignment with RAPPP Matrix & Field Problem Solving)** Di bawah subprogram "Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi", sinkronisasi diarahkan untuk menjawab persoalan berikut: • Pelepasan Hak Ulayat dan Sertifikasi (SHM) Persoalan Lapangan: Sering terjadi tumpang tindih klaim adat dan ketakutan hilangnya hak atas tanah pada lokasi cetak sawah. Solusi SHEK: Mengintegrasikan redistribusi aset dan sertifikasi tanah (SHM) yang mencantumkan kepemilikan OAP/komunal secara transparan untuk menjamin kepastian hukum. • Sarana Produksi dan Alsintan Persoalan Lapangan: Alat dan mesin pertanian (alsintan) cetak sawah sering tersendat penggunaannya karena kurangnya suku cadang dan keterbatasan keterampilan operasional OAP.

	Solusi SHEK: Menyediakan skema pendampingan teknis dan penyediaan catu pangan masa transisi hingga lahan mencapai produktivitas stabil. **2. Harmonisasi (Socio-Cultural Adaptation)** • Adaptasi Budaya Tanam (Lahan Kering ke Sawah) Persoalan Lapangan: Petani OAP terbiasa dengan pola bercocok tanam umbi-umbian/lahan kering sehingga menghadapi kendala teknis saat beralih ke budidaya padi sawah tergenang. Solusi SHEK: Menerapkan pendekatan "Mendayagunakan Potensi Masyarakat Hukum Adat" melalui pelatihan lapangan bertahap, demonstration plot (demplot), serta melibatkan tokoh adat dan tokoh agama untuk membangun pemahaman bersama tanpa pemaksaan kultural. **3. Evaluasi (Infrastructural, Health, and Resource Assessment)** • Infrastruktur Irigasi dan Aksesibilitas (DTI) Persoalan Lapangan: Lahan cetak sawah di kawasan Klamono-Segun berisiko mangkrak akibat belum terbangunnya saluran irigasi primer/sekunder dan rusaknya jalan usaha tani ke lokasi pasar. Solusi SHEK: Mengintervensi penanganan jalan di Distrik Klamono, Segun, Salawati, Mayamuk, Malabotom, dan Klasafet melalui "Program Penyelenggaraan Jalan" dan jaringan irigasi berbasis Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

	• Kesehatan Petani dan Layanan Dasar Persoalan Lapangan: Tingginya risiko malaria dan keterbatasan sarana kesehatan di kawasan pembukaan lahan baru. Solusi SHEK: Mengintegrasikan Misi "Papua Sehat" melalui "Penguatan Pelayanan Kesehatan Bergerak" dan penempatan tenaga medis di Puskesmas/Pustu (SOPHI) dengan dukungan Dana Otsus 1,25%. **4. Koordinasi (Cross-Sectoral Action)** BPP mengoordinasikan kolaborasi penanganan lapangan secara terpadu: • Dinas Pertanian dan Kementan/TNI: Pengawasan teknis pembukaan lahan cetak sawah dan pencetakan petakan sawah yang presisi. • Dinas Transmigrasi/Kemnaker: Kesiapan hunian dan penataan warga transmigran lokal OAP di sekitar lokasi cetak sawah. • Dinas Pekerjaan Umum (PUPR): Percepatan konstruksi irigasi dan perbaikan jalan konektivitas dengan memanfaatkan skema DTI.
Hasil Kegiatan	Melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang melibatkan BP3OKP dan Dinas Transnakertrans ESDM Provinsi Papua Barat Daya, diperoleh beberapa hasil strategis sebagai berikut: • Isu Legalitas dan Pertanahan: Teridentifikasinya potensi kendala tumpang tindih hak ulayat dan kepastian hukum kepemilikan lahan di wilayah pengembangan kawasan transmigrasi.

	• Infrastruktur Pendukung: Ditemukannya celah (gap) infrastruktur berupa belum terhubungnya jaringan irigasi (sekunder/tersier) dan tingginya tingkat kerusakan jalan usaha tani di koridor Klamono–Segun. • Kapasitas SDM dan Budaya Tanam: Teridentifikasinya tantangan transisi teknis petani OAP dari pola bercocok tanam lahan kering/umbi-umbian menuju budidaya padi sawah tergenang, serta kendala pemeliharaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Penyelesaian Aspek Legalitas dan Musyawarah Hak Ulayat • Aksi: Melaksanakan musyawarah adat secara inklusif bersama masyarakat hukum adat di lokasi Segun dan Klamono (Klawosom) untuk penerbitan surat pelepasan hak atas tanah. • Target Output: Kepastian lokasi pembangunan dan percepatan sertifikasi Tanah Hak Milik (SHM) bagi OAP untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus akses modal UMK. 2. Pengusulan Intervensi Infrastruktur Kunci melalui DTI • Aksi: Menyusun usulan prioritas pengalokasian Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) kepada sektor Pekerjaan Umum untuk penanganan jalan dan jembatan di Distrik Klamono, Segun, Salawati, Mayamuk, Malabotom, dan Klasafet. • Target Output: Pembangunan jaringan irigasi dan pembukaan jalan konektivitas dari lahan produksi/cetak sawah menuju pusat pasar regional guna menjaga rantai pasok.

	3. Pelaksanaan Sekolah Lapang dan Pendampingan Budaya Tanam OAP • Aksi: Menginisiasi program Sekolah Lapang Pertanian secara berkelanjutan dengan menerjunkan penyuluh teknis dan membuat Demonstration Plot (Demplot) budidaya padi sawah. • Target Output: Peningkatan kapasitas teknis petani OAP, ketersediaan suku cadang/perawatan alsintan, serta kelancaran distribusi catu pangan selama masa transisi awal. 4. Integrasi Layanan Kesehatan Bergerak di Kawasan Transmigrasi dan PSN • Aksi: Mengalokasikan Dana Otsus 1,25% untuk penyediaan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan pemenuhan sarana-prasarana Puskesmas/Pustu/Posyandu (SOPHI) di 45 kampung kawasan Klamono–Saigun. • Target Output: Terjaminnya kesehatan dasar dan penanggulangan risiko penyakit endemik, seperti malaria, bagi para petani dan transmigran lokal di area pembukaan lahan baru.

Dokumentasi	 

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Jambore Pemuda Adat Domberay
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin–Selasa, 10–11 Agustus 2026 Rumah Etnik Kabupaten Sorong dan Gedung Lambert Jitmau, Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif.

	• Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Jambore Pemuda Adat Domberay Tahun 2026 dilaksanakan pada 5–11 Agustus 2026 di wilayah Papua Barat Daya. Rangkaian kegiatan berlangsung di Rumah Etnik Papua, Aimas, Kabupaten Sorong, dan ditutup melalui Apresiasi Budaya Domberay di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, pada 11 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan pemuda adat, masyarakat adat, pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pelestarian serta pengembangan kebudayaan Domberay. Puncak kegiatan dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, unsur BP3OKP, pemerintah kabupaten/kota, tokoh adat, pelaku budaya, dan pemuda adat. Wamen Kebudayaan mendorong pemuda adat Domberay agar tidak hanya menjadi pewaris budaya, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pemajuan kebudayaan. Dalam perspektif RAPPP Papua Barat Daya, kebudayaan dan masyarakat adat merupakan bagian dari prasyarat pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial. Matriks juga secara eksplisit memuat penguatan seni dan budaya lokal,

	pelestarian warisan budaya/cagar budaya, serta program pengembangan kebudayaan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengidentifikasi substansi dan hasil Jambore Pemuda Adat Domberay sebagai bagian dari pembangunan Papua Barat Daya. • Memastikan kegiatan kebudayaan dan pemberdayaan pemuda adat selaras dengan Misi Papua Produktif. • Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap program pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat adat, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. • Menghubungkan aspirasi pemuda adat dengan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Matriks RAPPP Papua Barat Daya dan RIPPP Gabungan.
Peserta Kegiatan	• Kementerian Kebudayaan RI • Gubernur Provinsi Papua Barat Daya • Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya • Pokja Produktif, Cerdas dan Polhukam BPP Provinsi Papua Barat Daya (Alberd Berhad Duwith, Dea A. Varena, Grein G. T. Wutoy, Virginus Turot) • Pemerintah Kota Sorong • Pemerintah Kabupaten Sorong • Pemuda adat Domberay • Masyarakat adat • Tokoh adat • Pelaku seni dan budaya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi

	Jambore Pemuda Adat Domberay memiliki keterkaitan langsung dengan arah Papua Produktif, khususnya pengembangan kapasitas manusia, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dalam Matriks RAPPP, Misi Papua Produktif mencakup peningkatan investasi kawasan dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian, kebudayaan Domberay tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan pelestarian, tetapi dapat menjadi modal sosial dan ekonomi untuk mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif, industri budaya, dan peluang usaha masyarakat adat. • Harmonisasi Kegiatan ini sejalan dengan RAPPP yang menempatkan Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial sebagai prasyarat pembangunan. Matriks memuat program pengembangan kebudayaan melalui pembinaan lembaga adat dan peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan. Karena itu, aspirasi pemuda adat Domberay perlu diharmonisasikan dengan kebijakan pembangunan daerah agar kebudayaan tidak berjalan sebagai agenda sektoral, tetapi terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. • Evaluasi

	Dari perspektif evaluasi, Jambore perlu dilihat tidak hanya dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari outcome yang dihasilkan, antara lain terbentuknya jejaring pemuda adat, terdokumentasinya pengetahuan budaya, meningkatnya kapasitas pelaku budaya, berkembangnya produk ekonomi kreatif, serta adanya tindak lanjut terhadap aspirasi pemuda adat. Hal ini penting karena Wamen Kebudayaan juga menekankan bahwa investasi kebudayaan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pariwisata, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat. • Koordinasi Penyerahan aspirasi pemuda adat kepada Wamen Kebudayaan menjadi momentum untuk membangun koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, BP3OKP, masyarakat adat, dan pemuda. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah menjadikan budaya dan tradisi masyarakat adat sebagai kompas dalam kemajuan kebudayaan Domberay.
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Budaya sebagai Modal Ekonomi Budaya Domberay memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. • Pemuda sebagai Aktor Pembangunan Pemuda adat perlu diposisikan sebagai pelaku, bukan hanya peserta kegiatan.

	• Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pengembangan budaya harus tetap memperhatikan tanah adat/ulayat dan kelembagaan masyarakat adat karena RAPPP menempatkan aspek tersebut sebagai prasyarat pembangunan. • Regenerasi Budaya Perlu ada mekanisme agar pengetahuan, seni, tradisi, dan nilai Domberay dapat diwariskan secara sistematis kepada generasi muda. • Integrasi ke Perencanaan Pembangunan Aspirasi Jambore perlu diterjemahkan menjadi program, kegiatan, output, indikator, dan pembiayaan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hasil Kegiatan	Kegiatan Jambore Pemuda Adat Domberay menghasilkan beberapa capaian penting yang relevan dengan pelaksanaan Misi Papua Produktif, yaitu: • Penguatan identitas dan pelestarian budaya Domberay. Kegiatan menjadi ruang bagi pemuda adat untuk mengenal, mendokumentasikan, dan mengembangkan kembali nilai, tradisi, seni, serta pengetahuan budaya leluhur. Hal ini sejalan dengan RAPPP yang menempatkan penguatan seni dan budaya lokal serta pelestarian warisan budaya/cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan Papua. • Meningkatnya peran pemuda adat sebagai pelaku pembangunan. Pemuda tidak hanya diposisikan sebagai penerima warisan budaya, tetapi sebagai aktor regenerasi

	dan penggerak pemajuan kebudayaan. Jambore membuka ruang dialog antarpemuda, tokoh adat, pemerintah, dan pelaku budaya untuk membangun komitmen bersama. • Teridentifikasinya potensi budaya sebagai aset ekonomi produktif. Kegiatan menunjukkan bahwa budaya Domberay dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, destinasi wisata budaya, produk kreatif, dan kegiatan berbasis komunitas. Arah ini memiliki keterkaitan langsung dengan RAPPP yang memuat pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. • Terbangunnya jejaring dan koordinasi lintas sektor. Jambore mempertemukan unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, BP3OKP, masyarakat adat, pemuda, seniman, dan pelaku budaya. Dengan demikian, kegiatan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pusat–daerah dan lintas pemangku kepentingan dalam pemajuan kebudayaan. • Munculnya aspirasi kebijakan dari pemuda adat. Pemuda Domberay menyampaikan aspirasi yang menempatkan budaya dan tradisi sebagai kompas pembangunan kebudayaan Domberay. Aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan berbasis budaya. • Terbukanya peluang integrasi budaya dengan pembangunan Papua Produktif.

	Hasil kegiatan memberikan dasar untuk mengembangkan program lanjutan berupa pemetaan potensi budaya, penguatan kapasitas pemuda adat, dokumentasi budaya, pengembangan ekonomi kreatif, wisata budaya, serta pelindungan masyarakat dan warisan budaya. RAPPP juga memuat program pengembangan kebudayaan, pembinaan lembaga adat, serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Perlu dipisahkan Dinas Kebudayaan dari Dinas Pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya. • Kegiatan Jambore Pemuda Adat Domberay perlu menjadi agenda bersama antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	 

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Introduction Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 12 Agustus 2026 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat.
Sasaran Strategis sesuai IKU	Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output.
IKU Pokja	Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua.
Latar Belakang	Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan masyarakat Papua yang produktif, mandiri, dan

	sejahtera. Dalam konteks tersebut, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan potensi ekonomi daerah. Kabupaten Raja Ampat memiliki berbagai potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Namun, pengembangan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, akses pasar, serta penguatan kemitraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran mengenai kondisi koperasi dan UMKM, potensi pengembangan ekonomi produktif, serta berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Raja Ampat. Koordinasi ini diharapkan menjadi dasar untuk membangun sinergi antara Pokja Papua Produktif, BPP Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan perangkat daerah terkait dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melakukan pemetaan awal terhadap kondisi dan potensi koperasi serta UMKM di Kabupaten Raja Ampat.

	• Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi produktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan. • Menggali kebutuhan intervensi pemerintah dalam mendukung pelaku usaha lokal. • Mendorong penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat. • Mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. • Menghubungkan potensi usaha masyarakat dengan peluang kemitraan dan pasar. • Mengidentifikasi program yang dapat dikembangkan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan pihak terkait. • Menjadikan hasil koordinasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut Pokja Papua Produktif.
Peserta Kegiatan	• Anggota Pokja Produktif dan Pokja Cerdas BPP PBD (Herman W. Tubur, Dea A. Varena) • Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Raja Ampat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	**1. Kondisi Koperasi dan UMKM** Pembahasan diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai: • Kondisi kelembagaan koperasi di Kabupaten Raja Ampat. • Kondisi dan perkembangan UMKM. • Sebaran pelaku usaha berdasarkan wilayah dan bidang usaha.

	• Potensi usaha masyarakat yang dapat dikembangkan. Kondisi kapasitas dan sumber daya pelaku usaha. **2. Potensi Ekonomi Produktif** Pembahasan diarahkan pada identifikasi potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi basis pengembangan usaha masyarakat, termasuk: • Potensi sumber daya lokal. • Produk unggulan daerah. • Usaha masyarakat berbasis kampung. • Peluang pengembangan usaha melalui koperasi. • Peluang peningkatan nilai tambah produk lokal. **3. Penguatan Kelembagaan** Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi: • Penguatan tata kelola koperasi. • Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi. • Penguatan kelembagaan UMKM. • Legalitas dan administrasi usaha. • Pendampingan bagi koperasi dan pelaku UMKM. **4. Akses Pembiayaan** Pembahasan juga diarahkan pada kebutuhan pelaku usaha terhadap: • Akses permodalan. • Informasi sumber pembiayaan. • Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha. • Kemitraan dengan lembaga keuangan. • Skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat. **5. Akses Pasar dan Kemitraan**

	Diperlukan penguatan akses pasar melalui: • Pengembangan jaringan pemasaran. • Promosi produk lokal. • Digitalisasi pemasaran. • Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. • Peningkatan kualitas dan daya saing produk. **6. Peran Pokja Papua Produktif** Pokja Papua Produktif dapat berperan dalam: • Memfasilitasi koordinasi lintas pihak. • Mengidentifikasi program prioritas. • Mendorong kolaborasi dan kemitraan. • Memberikan masukan terhadap pengembangan kebijakan ekonomi produktif. • Mengawal tindak lanjut hasil koordinasi.
Hasil Kegiatan	• Diperolehnya gambaran awal mengenai kondisi dan kebutuhan pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Raja Ampat. • Teridentifikasinya potensi pengembangan ekonomi produktif yang dapat menjadi perhatian dalam program pembangunan daerah. • Teridentifikasinya kebutuhan penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku koperasi dan UMKM. • Teridentifikasinya kebutuhan dukungan dalam aspek pembiayaan, pemasaran, pendampingan, teknologi, dan kemitraan. • Terbukanya peluang kolaborasi antara Pokja Papua Produktif dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Koperasi dan UMKM. • Hasil koordinasi dapat menjadi bahan bagi Pokja dalam menyusun pemetaan, rekomendasi, dan

	rencana intervensi pengembangan ekonomi produktif di Kabupaten Raja Ampat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Pemetaan • Melakukan pemetaan koperasi dan UMKM berdasarkan wilayah, sektor usaha, komoditas, kapasitas, dan kebutuhan. • Mengidentifikasi produk dan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan. • Mengidentifikasi koperasi dan UMKM yang membutuhkan pendampingan prioritas. 2. Penguatan Koperasi dan UMKM • Mendorong peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi. • Meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasi UMKM. • Mendorong peningkatan legalitas dan kelembagaan usaha. • Mengembangkan model pendampingan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah Raja Ampat 3. Akses Pembiayaan dan Pasar • Mengidentifikasi sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh koperasi dan UMKM. • Mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan dan dunia usaha. • Membuka akses pemasaran bagi produk UMKM. • Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan pengembangan usaha.

	4. Pengembangan Ekonomi Lokal • Mengembangkan usaha berdasarkan potensi dan keunggulan lokal. • Mendorong peningkatan nilai tambah produk masyarakat. • Mengembangkan rantai nilai dari produksi, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. • Mendorong koperasi sebagai salah satu wadah penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. 5. Koordinasi dan Monitoring • Menindaklanjuti hasil koordinasi melalui komunikasi antara Pokja Papua Produktif dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat. • Menyusun daftar kebutuhan prioritas koperasi dan UMKM. • Menentukan potensi program yang dapat dilakukan secara kolaboratif. • Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut dan perkembangan program pengembangan ekonomi produktif.

Dokumentasi	 

Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja pada Kampung Nelayan Merah Putih Wilayah Timur Kabupaten Raja Ampat.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat, 14 Agustus 2026 di Lokus Kampung Nelayan Merah Putih Wilayah Timur, Waisai.
Sasaran Strategis sesuai IKU	Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output.
IKU Pokja	Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua.
Latar Belakang	Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana

	perikanan, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar serta masyarakat yang sebagian menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Oleh karena itu, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih perlu diarahkan agar mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta membuka akses pasar dan pembiayaan. Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi di lapangan, Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya melaksanakan kunjungan kerja pada Kampung Nelayan Merah Putih Wilayah Timur Kabupaten Raja Ampat. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi masyarakat nelayan, potensi ekonomi, sarana dan prasarana pendukung, serta berbagai kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melakukan observasi langsung terhadap kondisi dan aktivitas masyarakat nelayan. • Memetakan potensi ekonomi produktif yang dapat dikembangkan. • Mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat dan kelompok nelayan. • Mengidentifikasi peluang penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

	• Menggali potensi pengembangan rantai nilai usaha perikanan dari produksi hingga pemasaran. • Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat nelayan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. • Menjadikan hasil kunjungan sebagai bahan penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut Pokja Papua Produktif.
Peserta Kegiatan	• Staf Koperasi Nelayan Merah Putih • Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya • Kelompok Kerja BPP Provinsi Papua Barat Daya (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai: Rosaline Krimadi, Helena Tuririday, Dea Varena, Herman Tubur, Grein Wutoy)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	1. Kondisi Kampung Nelayan Pembahasan diarahkan pada: • Kondisi umum Kampung Nelayan Merah Putih. • Kondisi kehidupan dan aktivitas masyarakat nelayan. • Jumlah dan karakteristik kelompok nelayan. • Aktivitas ekonomi masyarakat. • Kondisi lingkungan dan kawasan permukiman nelayan. 2. Potensi Kelautan dan Perikanan Beberapa aspek yang perlu diidentifikasi meliputi: • Potensi sumber daya ikan.

	• Aktivitas penangkapan ikan. • Potensi usaha budi daya perikanan. • Potensi pengolahan hasil perikanan. • Potensi usaha turunan berbasis kelautan dan perikanan. • Potensi pengembangan produk unggulan masyarakat. 3. Sarana dan Prasarana Pembahasan mengenai kebutuhan dan kondisi: • Tempat pendaratan/penanganan hasil tangkapan. • Fasilitas penyimpanan hasil perikanan. • Ketersediaan air dan listrik. • Akses transportasi dan konektivitas. • Sarana produksi nelayan. • Fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 4. Penguatan Ekonomi Nelayan Pembahasan diarahkan pada: • Peningkatan produktivitas nelayan. • Penguatan kelompok/kelembagaan nelayan. • Pengembangan usaha bersama. • Peningkatan nilai tambah hasil tangkapan. • Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan. • Penguatan akses pasar. 5. Pembiayaan dan Kemitraan Perlu didorong: • Akses pembiayaan bagi nelayan. • Kemitraan dengan koperasi. • Kemitraan dengan pelaku usaha.

	• Dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha. • Pendampingan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. 6. Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Kampung Nelayan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat, termasuk: • Peningkatan kapasitas nelayan. • Pelibatan keluarga nelayan dalam kegiatan ekonomi. • Pengembangan usaha mikro berbasis hasil perikanan. • Peningkatan keterampilan pengolahan dan pemasaran. • Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Hasil Kegiatan	• Teridentifikasinya potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. • Teridentifikasinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan nelayan. • Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan produksi dan pemasaran hasil perikanan. • Teridentifikasinya peluang pengembangan usaha produktif berbasis perikanan. • Teridentifikasinya kebutuhan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat nelayan. • Terbukanya peluang sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Pokja Papua

	Produktif, masyarakat nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya. • Hasil kunjungan menjadi bahan awal untuk penyusunan rekomendasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	1. Pemetaan Potensi • Melakukan pemetaan potensi perikanan dan usaha ekonomi masyarakat. • Mengidentifikasi kelompok nelayan dan pelaku usaha yang menjadi prioritas pendampingan. • Mengidentifikasi produk perikanan yang memiliki potensi pasar dan nilai tambah. 2. Penguatan Sarana dan Prasarana • Menginventarisasi kebutuhan sarana produksi nelayan. • Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas penyimpanan dan penanganan hasil tangkapan. • Mendorong peningkatan fasilitas pengolahan hasil perikanan. • Memperhatikan kebutuhan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas masyarakat nelayan. 3. Pengembangan Ekonomi Produktif • Mendorong pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah. • Mengembangkan usaha bersama berbasis kelompok nelayan. • Mendorong pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat. • Membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi produk nelayan. • Mendorong pengembangan usaha turunan yang melibatkan keluarga nelayan.

	4. Peningkatan Kapasitas • Melaksanakan pelatihan teknis bagi nelayan. • Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan keuangan. • Memberikan pendampingan terkait pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk. • Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan. 5. Koordinasi dan Monitoring • Menyusun daftar kebutuhan prioritas berdasarkan hasil kunjungan. • Melakukan koordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten Raja Ampat. • Mengidentifikasi program pemerintah yang dapat mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. • Mendorong keterlibatan pihak swasta dan mitra pembangunan. • Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil kunjungan.

Dokumentasi	 

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama Bapperida Kabupaten Sorong dalam rangka Persiapan Sharing Session Corporate Social Responsibility (CSR)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 27 Agustus 2026 Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.

Latar Belakang	Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk kontribusi sektor swasta yang dapat mendukung pembangunan daerah apabila diarahkan secara terencana dan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Dalam konteks pembangunan di Papua Barat Daya, optimalisasi kontribusi CSR perlu didorong agar tidak berjalan secara parsial, tetapi dapat bersinergi dengan program dan prioritas pembangunan daerah. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sharing Session CSR oleh Bapperida Kabupaten Sorong, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan SHEK bersama Bapperida Kabupaten Sorong untuk membahas persiapan kegiatan tersebut. Pembahasan diarahkan pada pentingnya penyelarasan program CSR dengan arah pembangunan Papua, khususnya RAPPP Tahun 2025–2029, sehingga kontribusi sektor swasta dapat mendukung program prioritas dan memberikan manfaat yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi bersama Bapperida Kabupaten Sorong dalam rangka persiapan pelaksanaan Sharing Session CSR. Kegiatan juga bertujuan memberikan arahan terkait pentingnya penyelarasan program CSR dengan RAPPP Tahun 2025–2029 dan prioritas pembangunan daerah, sehingga kontribusi sektor swasta dapat

	diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mengidentifikasi potensi dukungan sektor swasta pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif serta mendorong agar pelaksanaan CSR dapat terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan tidak tumpang tindih dengan program yang telah dibiayai melalui APBD, Dana Otsus, maupun sumber pendanaan pemerintah lainnya.
Peserta Kegiatan	• Bapperlitbang/Bapperida Kabupaten Sorong • BPP Papua Barat Daya (Anggota BPP, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif).
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan difokuskan pada persiapan pelaksanaan Sharing Session CSR yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Sorong serta penguatan konsep kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah. • BPP PBD memberikan arahan agar program CSR yang akan dibahas dalam Sharing Session tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial atau bantuan yang bersifat parsial, tetapi diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang

	selaras dengan RAPPP Tahun 2025–2029 dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong. • Dalam pembahasan juga ditekankan pentingnya sinkronisasi antara program CSR dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk menghindari tumpang tindih pendanaan maupun intervensi program. Kontribusi sektor swasta perlu diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang belum optimal terakomodasi melalui sumber pendanaan pemerintah dan memiliki potensi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. • BPP PBD juga memberikan arahan agar potensi dukungan CSR dapat dikembangkan pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, antara lain melalui dukungan pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM OAP, serta pengembangan komoditas unggulan dan potensi ekonomi lokal. • Pada aspek Papua Produktif, pembahasan diarahkan pada peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan komoditas lokal, hilirisasi, ketahanan pangan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta keterhubungan masyarakat dan UMKM OAP dengan rantai pasok sektor industri.

	• Selain itu, diperlukan penguatan basis data dan penetapan sasaran penerima manfaat agar program CSR dapat diarahkan secara tepat, khususnya kepada OAP dan masyarakat yang membutuhkan.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya SHEK BPP PBD bersama Bapperida Kabupaten Sorong dalam rangka persiapan pelaksanaan Sharing Session CSR. • Terbangunnya kesepahaman antara BPP PBD dan Bapperida Kabupaten Sorong mengenai pentingnya mengarahkan kontribusi CSR agar selaras dengan RAPPP Tahun 2025–2029 serta prioritas pembangunan daerah. • Diperolehnya arahan mengenai pentingnya mengintegrasikan potensi dukungan sektor swasta dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan CSR dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. • Teridentifikasinya potensi dukungan CSR pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi produktif yang dapat menjadi bahan pembahasan dalam pelaksanaan Sharing Session CSR. • Tersedianya bahan dan masukan bagi Bapperida Kabupaten Sorong dalam mempersiapkan

	pelaksanaan Sharing Session CSR bersama pihak swasta.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Bapperida Kabupaten Sorong perlu menindaklanjuti hasil SHEK dengan mempersiapkan pelaksanaan Sharing Session CSR bersama sektor swasta dengan mengacu pada arah pembangunan daerah dan RAPPP Tahun 2025–2029. • Program dan bentuk dukungan CSR yang akan dibahas perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah serta diselaraskan dengan program yang telah direncanakan Pemerintah Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan maupun kegiatan. • Perlu dilakukan identifikasi terhadap sektor, perusahaan, dan potensi dukungan CSR yang dapat diarahkan untuk mendukung program prioritas pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. • BPP PBD akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan dalam rangka memastikan pengembangan kolaborasi CSR dengan sektor swasta tetap selaras dengan arah RAPPP dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat, khususnya OAP.

Dokumentasi	   

3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam/Damai

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pengukuhan Paskibra; Renungan Suci; Pengibaran Bendera Merah Putih; Remisi; Penurunan Bendera Merah Putih; Resepsi Kenegaraan)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu–Senin, 15–17 Agustus 2026 di Provinsi Papua Barat Daya.
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Badan Pengarah Papua Papua Barat Daya diundang menghadiri rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sejak tanggal 15 hingga puncak acara tanggal 17 Agustus 2026.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Sinkronisasi Nilai Kebangsaan dengan Program Otsus Papua: Menghubungkan semangat pengorbanan para pahlawan dengan arah kebijakan Otonomi Khusus Papua, sehingga program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tetap berlandaskan nilai nasionalisme dan persatuan. • Harmonisasi Lintas Sektor: Memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, organisasi profesi,

	akademisi, dan masyarakat dalam satu wadah kebangsaan. Kehadiran Pokja menjadi simbol keterpaduan antara pembangunan daerah dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. • Evaluasi Kontribusi Program terhadap Semangat Nasionalisme: Menilai sejauh mana program-program prioritas, misalnya penanggulangan ATM, beasiswa tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan masyarakat Papua, mencerminkan nilai pengabdian dan pengorbanan yang diwariskan para pahlawan. • Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra: Memanfaatkan momentum kebersamaan dalam Renungan Suci untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bahwa program-program Pokja selaras dengan visi pembangunan daerah dan nasional. • Meneguhkan Komitmen Moral dan Etika Pengabdian: Kehadiran Pokja dalam acara ini bukan hanya seremonial, tetapi juga sebagai pernyataan moral bahwa setiap langkah pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Papua Barat Daya adalah kelanjutan dari perjuangan para pahlawan.
Peserta Kegiatan	• Gubernur. • Wakil Gubernur. • Pj. Sekretaris Daerah. • Forkopimda Papua Barat Daya. • Pasukan upacara: siswa dan siswi SD–SMU, mahasiswa, ASN Pemprov PBD, serta TNI dari seluruh jajaran yang ditugaskan.

	• BPP Papua Barat Daya (Anggota BPP PBD, Pokja Papua Sehat, serta Pokja Papua Produktif).
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Pokja Damai (Harmoni Sosial)
Poin-Poin Pembahasan	• Menjalankan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) dalam konteks Otsus Papua.. • Meneguhkan komitmen moral bahwa tata kelola program harus berlandaskan nilai perjuangan pahlawan. • Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui momentum kebersamaan. • Menjadi refleksi bagi Pokja dalam mengaitkan nilai perjuangan dengan tata kelola pembangunan Otsus.

Hasil Kegiatan	• Pelaksanaan Upacara Berjalan Khidmat
	  • Renungan Suci dilaksanakan sesuai tata upacara nasional.
	  • Peserta mengikuti dengan tertib, penuh penghormatan, dan suasana hening.
	• Kehadiran Lintas Sektor
	  • Pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh adat, organisasi profesi, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat hadir.
	  • Pokja Sehat BPP PBD turut serta sebagai representasi koordinasi lintas sektor dalam konteks Otsus Papua.
	• Penguatan Nilai Kebangsaan
	  • Peserta memperoleh refleksi mendalam tentang pengorbanan para pahlawan.

	• Semangat nasionalisme dan persatuan diteguhkan kembali di tengah tantangan pembangunan daerah. • Momentum Koordinasi dan Harmonisasi • Acara menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat. • Pokja Sehat BPP PBD memanfaatkan kegiatan ini untuk menegaskan peran SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) dalam mendukung tata kelola Otsus. • Dampak Sosial dan Moral • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melanjutkan perjuangan pahlawan melalui pembangunan nyata. • Memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Refleksi dan Evaluasi Internal Pokja • Melakukan diskusi internal untuk mengaitkan nilai perjuangan pahlawan dengan misi Pokja dalam menjalankan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi). • Menyusun rekomendasi agar nilai kebangsaan lebih terintegrasi dalam program Otsus Papua. • Penguatan Koordinasi Lintas Sektor • Menindaklanjuti komunikasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan organisasi profesi yang hadir. • Membuka ruang kolaborasi baru dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

	• Integrasi Nilai Patriotisme dalam Program Otsus
	  • Memastikan bahwa program-program Pokja, misalnya kesehatan masyarakat, pendidikan tenaga kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, mencerminkan semangat pengabdian dan persatuan.
	  • Menyusun agenda sosialisasi nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui kegiatan promotif-preventif.
	• Publikasi dan Edukasi
	  • Menyebarkan pesan moral dari kegiatan Renungan Suci melalui media lokal, internal Pokja, dan forum masyarakat.
	  • Mengajak generasi muda untuk meneladani semangat pahlawan dalam pembangunan Papua Barat Daya.
	• Monitoring Dampak Sosial
	  • Mengamati respons masyarakat terhadap kegiatan ini, khususnya dalam hal peningkatan rasa nasionalisme.
	  • Menjadikan hasil pengamatan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Dokumentasi	

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya (Kabupaten Maybrat)

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu–Kamis, 19–20 Agustus 2026 di Kantor Bupati Kabupaten Maybrat.
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan • Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua • Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Peristiwa kekerasan dan dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil, yaitu Mama Anike Fatie, Mama Selviana Sorry, dan Saudara Silvester Assem, di Kampung Ainod, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, pada 13 Agustus 2026 menimbulkan keresahan dan keprihatinan masyarakat. Kejadian ini dipandang sebagai bagian dari konflik berkepanjangan di wilayah Maybrat sejak tahun 2021 yang telah menyebabkan korban jiwa, gangguan keamanan, dan pengungsian masyarakat. Sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai, Forum Masyarakat Maybrat Pro Demokrasi dan Peduli Kemanusiaan bersama masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa melaksanakan aksi demo damai pada 19 Agustus 2026 di depan Kantor Bupati Maybrat. Aksi tersebut merupakan hari ketiga dan bertujuan meminta pemerintah serta aparat keamanan memberikan kejelasan dan keadilan bagi para korban, mengusut kasus secara terbuka dan adil,

	serta mengevaluasi penempatan Satuan Tugas (Satgas) TNI Non Organik di wilayah Maybrat. Dalam aksi tersebut, masyarakat juga meminta adanya perhatian terhadap pemulihan korban, penyelesaian tuntutan keluarga, serta langkah nyata pemerintah dalam menciptakan keamanan dan kondisi yang memungkinkan masyarakat kembali menjalankan kehidupan dan pembangunan secara aman.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kehadiran Pokja Papua Damai bersama Anggota BPP bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat Maybrat, memastikan aspirasi tersebut terdokumentasi, serta menjadi bahan koordinasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai tugas dan kewenangan BPP. Secara konkret, kehadiran tersebut untuk: • Mendorong penyelesaian secara damai dan terukur, termasuk penanganan korban serta proses hukum sesuai kewenangan yang berlaku. • Mengidentifikasi persoalan keamanan yang berdampak pada pembangunan dan masyarakat di Maybrat. • Mengoordinasikan hasil aspirasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai bahan tindak lanjut. • Menyampaikan hasil dan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan kebijakan dan dukungan penyelesaian sesuai kewenangan pusat.
Peserta Kegiatan	• Gubernur Papua Barat Daya bersama Forkopimda PBD

	• Anggota BPP PBD • Pokja Damai (Virginus Turot) dan Pokja Produktif (Herman Tubur) BPP PBD • Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Forkopimda • Tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Maybrat.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Penanganan kasus kekerasan terhadap tiga warga sipil di Kampung Ainod, Distrik Aifat, pada 13 Agustus 2026. • Proses investigasi dan penegakan hukum yang transparan, adil, serta melibatkan pihak keluarga korban. • Evaluasi kondisi keamanan dan keberadaan Satgas Non Organik di wilayah Maybrat. • Pemulihan dan perlindungan korban, termasuk biaya pengobatan dan kepulangan ke kampung halaman. • Penyelesaian tuntutan ganti rugi dan denda adat yang disampaikan oleh keluarga korban. • Penyelesaian konflik berkepanjangan di Maybrat dan pencegahan terjadinya kekerasan kembali. • Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, khususnya terkait hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (kewenangan mengevaluasi Satgas Non Organik). • Penguatan koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan BPP untuk mendukung perdamaian dan keberlanjutan pembangunan Maybrat.

Hasil Kegiatan	• Aspirasi masyarakat Maybrat telah diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Maybrat, Kapolda Papua Barat Daya, dan unsur terkait. • Pemprov PBD mendukung pengusutan kasus kekerasan terhadap tiga warga sipil dan menjamin biaya pengobatan korban. • Polda Papua Barat Daya menyatakan siap melakukan penyelidikan secara tuntas serta meminta dukungan masyarakat agar proses berjalan aman dan akuntabel. • Pemprov PBD akan menyampaikan aspirasi terkait evaluasi Satgas kepada Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut berada di tingkat pusat. • Pemprov dan Pemda Maybrat sepakat membahas tuntutan ganti rugi dan denda adat bersama keluarga inti korban serta memberikan uang santunan kepada keluarga korban secara tunai sebesar Rp200 juta. • BPP/Pokja Papua Damai memperoleh bahan dan aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar koordinasi dan rekomendasi dalam mendukung penyelesaian konflik dan pembangunan yang damai di Maybrat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Pemprov PBD dan Pemda Maybrat melanjutkan penanganan dan pemulihan tiga korban serta penyelesaian tuntutan keluarga. • Polda Papua Barat Daya menyatakan siap melakukan penyelidikan secara tuntas serta meminta dukungan masyarakat agar proses berjalan aman dan akuntabel. • BPP/Pokja Papua Damai menyusun dan menyampaikan hasil aksi serta aspirasi masyarakat

	kepada pimpinan BPP untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Dokumentasi	 

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Pertemuan BPP PBD dengan Pihak Polres Maybrat dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat, 21 Agustus 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya.
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan • Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua • Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Gangguan keamanan akibat penyerangan kelompok bersenjata di beberapa wilayah Papua Barat Daya telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

	Masyarakat menjadi takut beraktivitas, sebagian mengungsi, sementara pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi terganggu. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, meningkatnya biaya pembangunan, serta terhambatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Situasi keamanan yang tidak kondusif juga memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat. Aktivitas berkebun, berdagang, meramu, dan usaha lainnya menjadi terbatas. Terputusnya akses jalan, jembatan, dan komunikasi semakin memperbesar keterisolasian wilayah serta mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan mengembangkan usaha. Dalam kerangka percepatan pembangunan Papua, kondisi Papua Damai menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Karena itu, penanganan korban tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemulihan layanan dasar, pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan dukungan agar masyarakat dapat kembali ke kampung secara aman.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melakukan harmonisasi melalui identifikasi dampak konflik terhadap masyarakat dan pembangunan. • Menghimpun kebutuhan korban untuk pemulihan sosial dan ekonomi. • Memberikan masukan kebijakan terkait penanganan korban dan wilayah terdampak. • Mendorong koordinasi pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan.

	• Memperkuat peran misi Papua Damai melalui pemulihan masyarakat dan peningkatan kepercayaan kepada pemerintah.
Peserta Kegiatan	• Tokoh Masyarakat Aifat Timur • Anggota BPP PBD • Anggota Pokja Polhukam/Damai (Virginus Turot) • Perwakilan Polres Kab. Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Dampak gangguan keamanan terhadap pembangunan. • Dampak konflik terhadap ekonomi masyarakat. • Keamanan sebagai prasyarat pembangunan Papua. • Dukungan BPP bagi korban konflik. • Prioritas pemulihan wilayah terdampak. • Strategi pembangunan di daerah rawan konflik. • Koordinasi BPP, Pemda, dan pemerintah pusat. • Pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. • Hambatan percepatan pembangunan. • Peran TNI/Polri dalam mendukung pembangunan. • Indikator keberhasilan dan kepercayaan masyarakat. • Penguatan kebijakan pemulihan korban.
Hasil Kegiatan	• Teridentifikasi dampak gangguan keamanan terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat. • Teridentifikasi kebutuhan utama korban dan wilayah terdampak. • Diperoleh masukan terkait pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi.

	• Diperkuat koordinasi BP3OKP dengan Pemda dan pemerintah pusat. • Ditekankan pentingnya pendekatan Papua Damai melalui pembangunan kesejahteraan. • Diperoleh rekomendasi penguatan pemulihan korban dan pembangunan di wilayah rawan konflik.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Melakukan pendataan dan identifikasi kebutuhan korban. • Mengoordinasikan penanganan dengan Pemda dan kementerian/lembaga terkait. • Mendorong pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. • Mendorong kepulangan dan reintegrasi masyarakat terdampak secara aman. • Memperkuat dialog dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat. • Mengawal agar program pemulihan masuk dalam prioritas pembangunan daerah dan pusat.
Dokumentasi	

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD bersama Asintel Kasdam XVIII/Kasuari
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 25 Agustus 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua • Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Dalam rangka memperkenalkan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) Papua Barat Daya serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua, dilaksanakan pertemuan antara BPP Papua Barat Daya dengan Asintel Kasdam XVIII/Kasuari.

	Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkenalkan peran dan fungsi BPP Papua Barat Daya sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dengan unsur TNI, khususnya dalam mendukung terciptanya kondisi Papua yang damai dan kondusif. Selain itu, pertemuan menjadi forum diskusi mengenai kondisi keamanan dan situasi Papua Damai, khususnya di wilayah Kabupaten Maybrat, serta berbagai hal yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memperkenalkan tugas dan fungsi BPP Papua Barat Daya kepada Asintel Kasdam XVIII/Kasuari. • Membangun komunikasi dan sinergi antara BPP Papua Barat Daya dengan unsur TNI. • Mendiskusikan kondisi Papua Damai, khususnya situasi di Kabupaten Maybrat. • Mengidentifikasi berbagai kondisi yang dapat memengaruhi keamanan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Maybrat. • Membangun koordinasi dan sinergi dalam mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat serta pembangunan Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	• BPP Papua Barat Daya (Anggota BPP, Pokja Papua Produktif: Herman Tubur, Pokja Papua Damai: Grein Wutoy dan Virginus Turot) • Asintel Kasdam XVIII/Kasuari.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai

Poin-Poin Pembahasan	• Pengenalan tugas dan fungsi BPP Papua Barat Daya. • Peran BPP Papua Barat Daya dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Kondisi Papua Damai di wilayah Papua Barat Daya. • Kondisi keamanan dan situasi di Kabupaten Maybrat. • Dampak kondisi keamanan terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. • Pentingnya sinergi antara BPP dan unsur TNI dalam mendukung Papua yang aman dan kondusif. • Penguatan komunikasi dan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dengan unsur TNI.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya pengenalan tugas dan fungsi BPP Papua Barat Daya kepada Asintel Kasdam XVIII/Kasuari. • Terbangunnya komunikasi antara BPP Papua Barat Daya dengan unsur TNI. • Terbangunnya sinergi awal dalam mendukung kondisi Papua Damai di wilayah Papua Barat Daya. • Diperolehnya ruang diskusi mengenai kondisi keamanan dan situasi Papua Damai, khususnya di Kabupaten Maybrat. • Teridentifikasinya pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam mendukung keamanan, kedamaian, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Maybrat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dengan unsur TNI. • Menindaklanjuti hasil diskusi terkait kondisi Papua Damai di Kabupaten Maybrat.

	• Membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. • Menjadikan hasil komunikasi dan diskusi sebagai bahan koordinasi serta pelaksanaan tugas Pokja Papua Damai.
Dokumentasi	  

Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Peran SHEK BPP PBD pada Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 27 Agustus 2026 Hotel Aimas Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memastikan keberlanjutan

	pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi perangkat daerah, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks percepatan pembangunan Papua, penguatan tata kelola pemerintahan dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi program pembangunan. Kehadiran BPP PBD dalam kegiatan ini merupakan bagian dari peran SHEK melalui penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, sekaligus membangun sinergi dalam mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua sesuai arah kebijakan pembangunan di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Menghadiri kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. • Membangun sinergi antara BPP PBD dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Papua. • Memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	• Pemerintah Kabupaten Sorong • Forkopimda Papua Barat Daya • Anggota BPP PBD

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai (Harmoni Sosial)
Poin-Poin Pembahasan	• Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Pentingnya peran Sekretaris Daerah dalam mendukung koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. • Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. • Pentingnya komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sorong. • Peran BPP PBD dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK.
Hasil Kegiatan	• BPP PBD menghadiri kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong. • Terbangun komunikasi dan koordinasi antara BPP PBD dengan unsur Pemerintah Kabupaten Sorong. • Terjalin hubungan kerja dan sinergi kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi SHEK BPP PBD. • Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antarlembaga dalam mendukung percepatan pembangunan Papua di Kabupaten Sorong.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPP PBD dengan Pemerintah Kabupaten Sorong. • Mendorong sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua di Kabupaten Sorong. • Menindaklanjuti komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong terkait isu-isu strategis pembangunan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi BPP PBD. • Menjadikan hasil komunikasi dan koordinasi sebagai bahan dalam pelaksanaan SHEK serta penyusunan rekomendasi BPP PBD.
Dokumentasi	 

3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 3 Agustus 2026 Ruang Rapat Sulawesi, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 2. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 3. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik

Latar Belakang	Pada tanggal 16 Juli 2026 di Jayapura, para Gubernur dan Ketua DPRP se-Tanah Papua telah menyepakati Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesepakatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola Otsus agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2026 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua. Rapat ini menjadi ruang bersama untuk melihat sejauh mana kesepakatan yang telah dibuat di Jayapura mulai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam tindak lanjut tersebut antara lain perbaikan perencanaan dan penganggaran Otsus, keterpaduan data, penandaan kegiatan yang menggunakan Dana Otsus, penguatan pengawasan, pelaporan, serta memastikan penggunaan Dana Otsus sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Papua. Bagi BPP, rapat koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan di Jayapura tidak berhenti sebagai komitmen bersama, tetapi dilanjutkan dengan langkah dan kerja nyata di daerah. Dengan adanya pemantauan dan koordinasi secara bersama, diharapkan perbaikan tata kelola Otsus dapat berjalan lebih baik, terbuka, dan tepat sasaran, sehingga semakin membangun kepercayaan masyarakat serta

	mendukung terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melakukan sinkronisasi tindak lanjut Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otsus yang disepakati pada 16 Juli 2026 di Jayapura. • Melakukan harmonisasi kebijakan dan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam pelaksanaan Komitmen Bersama. • Mendorong koordinasi untuk memastikan tindak lanjut yang lebih jelas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya OAP. • Mendorong perbaikan tata kelola Otsus yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. • Memastikan tindak lanjut kesepakatan sejalan dengan Misi Papua Damai, terutama dalam mendukung pembangunan yang adil, transparan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Peserta Kegiatan	• Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) dari 6 provinsi se-Tanah Papua, termasuk perwakilan Papua Barat Daya beserta anggota Pokja. • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). • Kementerian Keuangan (Kemenkeu). • Kementerian PPN/Bappenas. • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korsupgah.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi

Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	• Tindak lanjut Komitmen Bersama 16 Juli 2026, termasuk perlunya langkah nyata dari masing-masing pemerintah daerah dan penerjemahan komitmen ke dalam program dan kegiatan yang jelas. • Perbaikan tata kelola Dana Otsus, agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya untuk OAP. • Penguatan data OAP dan penerima manfaat sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. • Sinkronisasi perencanaan pembangunan Papua, agar program Otsus selaras dengan RIPPP, RAPPP, dan dokumen perencanaan daerah. • Penguatan koordinasi pusat dan daerah, termasuk pelibatan BPP dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otsus. • Transparansi dan keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Otsus, program yang dibiayai, lokasi kegiatan, dan penerima manfaat. • Pengawasan dan pencegahan penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. • Penguatan tata kelola dalam mendukung Misi Papua Damai, melalui program yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

	• Penyusunan tindak lanjut yang jelas, dengan penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator hasil. • Penguatan partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.
Hasil Kegiatan	• Terbangunnya kesepahaman untuk menindaklanjuti Komitmen Bersama 16 Juli 2026 dalam rangka perbaikan tata kelola Otsus. • Pengelolaan Dana Otsus diarahkan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama bagi OAP. • Diperlukan penguatan data OAP sebagai dasar perencanaan dan penetapan penerima manfaat. • Diperkuat koordinasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Otsus. • Tata kelola Otsus yang baik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung Misi Papua Damai.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menindaklanjuti Komitmen Bersama 16 Juli 2026 melalui rencana aksi yang jelas dan terukur. • Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola Dana Otsus. • Memperbarui dan menyinkronkan data OAP sebagai dasar penetapan program dan penerima manfaat. • Meningkatkan transparansi, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Dana Otsus. • Memastikan program Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dokumentasi	-

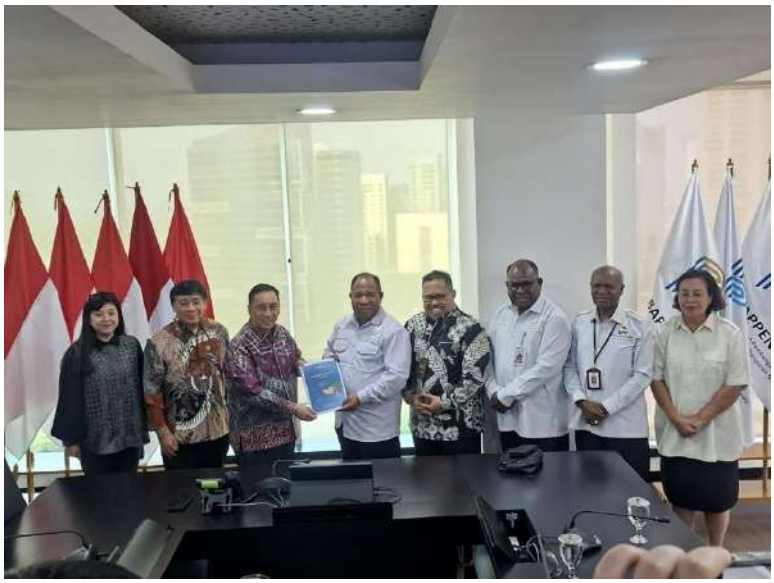
Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Audiensi BPP bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dalam Rangka Tindak Lanjut Dialog Strategis dan Penguatan Implementasi RAPPP Tahun 2025–2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 5 Agustus 2026 Kantor Wakil Menteri Bappenas, Jakarta
Sasaran Strategis sesuai IKU	4. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 5. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 6. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	4. Indeks rata-rata Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan 5. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 6. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	RAPPP Tahun 2025–2029 merupakan instrumen dalam mengarahkan pelaksanaan percepatan pembangunan Papua secara terintegrasi dan sinergis. Dalam rangka memastikan implementasi RAPPP dapat dilaksanakan secara bersama oleh para pihak, diperlukan penguatan koordinasi antara BPP dengan Kementerian PPN/Bappenas serta pemangku kepentingan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, BPP melaksanakan audiensi bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut Dialog Strategis dan untuk memperkuat kebersamaan para pihak dalam implementasi RAPPP Tahun 2025–

	2029, termasuk penguatan peran BPP sebagai bagian dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Menindaklanjuti hasil Dialog Strategis terkait implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Memperkuat kebersamaan dan sinergi para pihak dalam pelaksanaan RAPPP Tahun 2025–2029. • Memperjelas dan memperkuat peran BPP sebagai Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam mendukung implementasi RAPPP. • Mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi strategis yang dapat memperkuat sinergi implementasi RAPPP Tahun 2025–2029.
Peserta Kegiatan	• Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) dari 6 provinsi se-Tanah Papua. • Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas beserta jajaran.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu)
Poin-Poin Pembahasan	• Kebersamaan para pihak dalam implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Penguatan sinergi antara BPP, Kementerian PPN/Bappenas, dan para pihak terkait dalam mendukung implementasi RAPPP.

	• Peran dan keterlibatan BPP sebagai Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Pentingnya koordinasi strategis dan kerja bersama agar implementasi RAPPP dapat berjalan secara terarah dan sinergis. • Tindak lanjut hasil Dialog Strategis sebagai bagian dari penguatan implementasi RAPPP Tahun 2025–2029.
Hasil Kegiatan	• Terbangunnya kesepahaman mengenai pentingnya kebersamaan dan sinergi para pihak dalam implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Menguatnya pemahaman mengenai posisi dan peran BPP sebagai Tim Pengarah dalam mendukung implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Teridentifikasinya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara BPP, Kementerian PPN/Bappenas, dan para pihak terkait dalam pelaksanaan RAPPP. • Disepakatinya perlunya mekanisme koordinasi strategis yang dapat memperkuat sinergi implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Terbangunnya komitmen untuk menindaklanjuti hasil Dialog Strategis melalui penguatan koordinasi dan kerja bersama dalam implementasi RAPPP Tahun 2025–2029.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sinergi Implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 sebagai wadah koordinasi para pihak dalam mendukung pelaksanaan RAPPP. • Menindaklanjuti pembentukan Tim Koordinasi Strategis melalui koordinasi antara BPP dan

	Kementerian PPN/Bappenas serta para pihak terkait. • Memperkuat peran BPP sebagai Tim Pengarah dalam melakukan koordinasi strategis terhadap implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Menyusun dan menyepakati mekanisme kerja serta koordinasi antar-pihak dalam rangka mendukung sinergi implementasi RAPPP Tahun 2025–2029. • Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Dialog Strategis dan perkembangan implementasi RAPPP secara berkelanjutan. • Mendorong keterlibatan aktif para pihak sesuai dengan peran masing-masing untuk memastikan implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 berjalan secara sinergis dan terarah.
Dokumentasi	

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Pelaksanaan Fungsi SHEK BPP PBD melalui Monitoring Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 5 Agustus 2026 Virtual/Daring (Zoom Meetings)
Sasaran Strategis sesuai IKU	7. Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output

	8. Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 9. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	7. Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 8. Indeks Pelaksanaan Komunikasi Publik
Latar Belakang	Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2026 masih mengalami keterlambatan di sejumlah daerah di Tanah Papua. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan pengawasan dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, bersama pemerintah daerah, untuk memastikan tata kelola, kelengkapan persyaratan, serta proses penyaluran dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu. Dana Otsus dan DTI merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. RIPPP mengarahkan DTI antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi, sedangkan pelaksanaan RAPPP perlu didukung sinergi pendanaan pusat dan daerah serta berorientasi pada pencapaian output dan outcome. Dalam konteks tersebut, monitoring rapat percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan

	Koordinasi (SHEK) BPP Papua Barat Daya, khususnya dalam memastikan penyaluran dan pemanfaatan dana dapat mendukung program percepatan pembangunan Papua Barat Daya sesuai arah RIPPP dan RAPPP. Kegiatan monitoring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri membahas perkembangan penyaluran, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, serta sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang terintegrasi. Bagi Papua Barat Daya, kegiatan ini penting untuk mengetahui perkembangan kesiapan dokumen dan proses penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II serta mendorong koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelesaian seluruh persyaratan penyaluran.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Melaksanakan fungsi SHEK dalam monitoring percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026. • Memperoleh informasi mengenai perkembangan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II, mengidentifikasi kendala penyaluran dan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan keterkaitan pemanfaatan dana dengan program prioritas percepatan pembangunan Papua Barat Daya, khususnya Misi Papua Produktif. • Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap progres penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang masih mengalami keterlambatan.

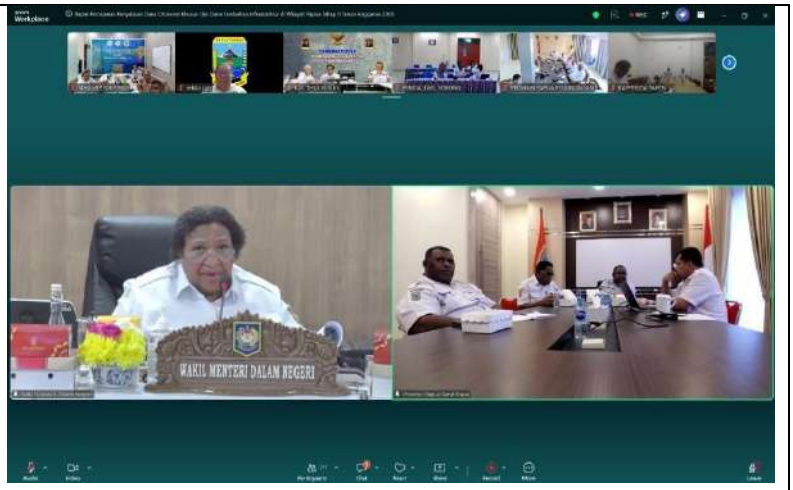
	• Memastikan sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran melalui interoperabilitas sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD. • Mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persyaratan administrasi dan teknis agar dana dapat segera disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). • Mendukung pimpinan BPP dalam melaksanakan fungsi SHEK kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat Daya, guna mempercepat pemenuhan persyaratan salur dan mencegah terjadinya keterlambatan penyaluran.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Kelompok Kerja (Pokja) BPP Provinsi Papua Barat Daya. • Wakil Menteri Dalam Negeri. • Kementerian Keuangan. • KPK (Direktur V Korsubgah). • Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. • Gubernur di Tanah Papua. • Bapperida, BPKAD dan Inspektorat se-Tanah Papua.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif

	Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam pengelolaan Dana Otsus secara lebih serius. • Akan dilaksanakan pengawasan terhadap implementasi Otsus melalui task force. • Perlunya penguatan kerja sama antara kementerian dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat tata kelola Otsus. • Dibahas keterlambatan proses pencairan Dana Otsus Tahap II yang menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. • Interoperabilitas Sistem: sejak November 2025 telah dilakukan integrasi sistem perencanaan (SIPPP Bappenas), penganggaran (SIPD Kemendagri), dan penyaluran (SIKD) untuk memastikan validitas dan konsistensi data. • Progres Penyaluran: berdasarkan PMK Nomor 33 Tahun 2024, penyaluran Tahap II seharusnya dilakukan pada Juni 2026. Namun, hingga Agustus 2026 baru sebagian daerah yang telah merealisasikan penyaluran. Di Papua Barat Daya, baru Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah menyalurkan Dana Otsus Tahap II sebesar 1,25%. Secara keseluruhan di Tanah Papua, terdapat delapan pemerintah daerah yang telah melakukan penyaluran Tahap II. • Persyaratan Salur Tahap II: daerah wajib mencapai realisasi anggaran minimal 50% dan capaian output minimal 15% dari tahap sebelumnya, serta menyampaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB)

	Perubahan yang mengakomodasi sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran pagu Otsus yang dicairkan pada Tahap II adalah sebesar 45%. • Atensi KPK: KPK menegaskan pentingnya tagging dan penggunaan rekening khusus (Rekus) untuk Dana Otsus guna mempermudah penelusuran/audit dan mencegah penyalahgunaan. Hal tersebut telah menjadi bagian dari 18 kesepakatan KPK bersama kepala daerah pada 16 Juli 2026 di Jayapura.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya monitoring terhadap perkembangan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026 serta teridentifikasinya sejumlah kendala dalam pemenuhan persyaratan penyaluran. • Monitoring menunjukkan bahwa percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan RAPPP, bukan semata-mata sebagai proses pencairan anggaran. • Pemanfaatan dana yang telah disalurkan perlu diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan jelas dengan prioritas pembangunan Papua Barat Daya, terutama pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung Misi Papua Produktif. • Untuk Papua Barat Daya, input Rencana Kegiatan (RK) ke dalam SIPD telah selesai, serta dokumen RHP, RK, dan RHAPD telah dikerjakan. • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan penyelesaian pembahasan RHP, penyampaian KUA-PPAS, dan penetapan APBD

	Perubahan sesuai jadwal yang disampaikan dalam rapat. • Sebagian besar kabupaten/kota di Papua Barat Daya masih perlu mempercepat penyelesaian RAP Perubahan agar memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II. • Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen melakukan koordinasi dan monitoring kepada bupati/wali kota untuk mempercepat penyerapan Tahap I sekaligus menyiapkan persyaratan penyaluran Tahap II. • Penyaluran dan pemanfaatan Dana Otsus dan DTI tetap harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, penggunaan rekening khusus, serta pencatatan/tagging Dana Otsus agar mudah dipantau dan diaudit. • Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan terus memberikan pendampingan teknis dalam rangka penyelesaian proses penyaluran Dana Otsus dan DTI.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Otsus. • Pemerintah daerah perlu meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran serta segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis penyaluran Tahap II. • BPP Papua Barat Daya perlu melakukan monitoring lanjutan terhadap status penyaluran dan realisasi Dana Otsus dan DTI Tahap II, termasuk melakukan pemetaan keterkaitan antara dana yang disalurkan dengan program/kegiatan dalam

	RAPPP serta mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan. • Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dalam penyelesaian kendala teknis dan administrasi penyaluran. • Mendorong Inspektorat/APIP untuk melakukan review secara substantif guna memastikan pengelolaan Dana Otsus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. • Memastikan pendampingan teknis oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan sampai proses penyaluran Dana Otsus dan DTI dapat diselesaikan. • BPP/Pokja terus melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap perkembangan penyaluran Dana Otsus dan DTI, khususnya terhadap daerah yang masih mengalami kendala pemenuhan persyaratan salur. • Gubernur Papua Barat Daya melakukan koordinasi intensif dengan bupati/wali kota di wilayah Papua Barat Daya untuk mempercepat penyerapan Tahap I dan penyelesaian persyaratan Tahap II, dengan target: (a) pembahasan RHP selesai pada Jumat, 7 Agustus 2026; (b) penyampaian KUA-PPAS kepada DPR direncanakan pada Senin, 10 Agustus 2026; dan (c) penetapan APBD Perubahan serta penyelesaian seluruh berkas ditargetkan tuntas pada 14 Agustus 2026.

Dokumentasi	

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Peran Serta BPP PBD pada Kegiatan Penandatanganan PKS KKPD & SP2D Online serta Sosialisasi Percepatan Implementasi SP2D Online
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 7 Agustus 2026 Hotel Vega Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif.
IKU Pokja	Indeks Efektifitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua.
Latar Belakang	Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses transaksi keuangan daerah.

	Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama PT Bank Pembangunan Daerah Papua melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) percepatan implementasi SP2D Online yang diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Implementasi SP2D Online dan KKPD diharapkan dapat menjadi instrumen dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, terintegrasi, aman, efektif, efisien, serta mendukung pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Memantau dan mengawal implementasi SP2D Online dan KKPD agar dapat diterapkan secara efektif pada OPD. • Mengidentifikasi kesiapan OPD, khususnya dari aspek SDM, sistem, administrasi, dan mekanisme pelaksanaan. • Mendorong koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, OPD, bendahara, dan PT Bank Papua dalam mendukung implementasi SP2D Online dan KKPD. • Memastikan proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tetap memperhatikan prinsip

	kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. • Mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam penerapan SP2D Online dan KKPD serta mendorong langkah penyelesaiannya. • Mendorong tersusunnya rencana aksi implementasi yang jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Anggota Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Barat Daya (Herman W. Tubur). • Kementerian Dalam Negeri. • Seluruh OPD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	**A. Implementasi SP2D Online** • SP2D Online merupakan bagian dari transformasi digital dalam proses pengelolaan dan pencairan keuangan daerah. • Penerapan sistem secara online diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana.

	• Sistem digital memungkinkan proses administrasi dan transaksi dilakukan secara lebih terintegrasi. • Diperlukan kesiapan OPD, khususnya bendahara dan pengelola keuangan, dalam memahami mekanisme SP2D Online. • Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan secara berkelanjutan selama tahap implementasi. **B. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)** • KKPD menjadi alternatif instrumen pembayaran dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah. • Penggunaan KKPD dapat mengurangi kebutuhan penyimpanan dan penggunaan uang tunai dalam jumlah besar oleh bendahara. • Transaksi menggunakan KKPD tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri. • Sistem tersebut mendukung proses pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban belanja. • Penggunaan KKPD harus tetap disesuaikan dengan ketentuan, kebutuhan, peruntukan, dan pagu anggaran yang tersedia. **C. Transparansi dan Akuntabilitas** • Setiap transaksi elektronik menghasilkan rekam jejak yang dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan.

	• Data transaksi dapat membantu pimpinan OPD dan aparat pengawasan dalam memastikan belanja sesuai dengan perencanaan dan anggaran. • Digitalisasi diharapkan dapat memperkuat pengendalian internal serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi dan transaksi keuangan. **D. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis** • Sosialisasi dan Bimtek diberikan kepada pimpinan OPD dan bendahara. • Bimtek diarahkan untuk meningkatkan pemahaman teknis mengenai penerapan SP2D Online. • Diperlukan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan agar implementasi sistem berjalan efektif.
Hasil Kegiatan	• Telah dilaksanakan penandatanganan MoU dan PKS antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua mengenai implementasi SP2D Online dan KKPD. • Telah dilaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis percepatan implementasi SP2D Online bagi pimpinan OPD dan bendahara. • Pimpinan OPD dan bendahara memperoleh pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi transaksi dan pengelolaan keuangan daerah. • Terbangunnya komitmen untuk mempercepat penerapan SP2D Online di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

	• KKPD diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung transaksi belanja daerah yang lebih aman, efisien, transparan, dan akuntabel. • Implementasi sistem digital memberikan peluang untuk memperkuat rekam jejak transaksi, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. • Teridentifikasi perlunya koordinasi dan pendampingan lanjutan antara pemerintah daerah, OPD, bendahara, dan PT Bank Papua untuk memastikan implementasi SP2D Online dan KKPD berjalan secara efektif.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Menyusun rencana aksi implementasi SP2D Online dan KKPD yang memuat tahapan, target, OPD sasaran, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. • Melakukan inventarisasi kesiapan seluruh OPD, meliputi SDM, perangkat, jaringan, administrasi, dan sistem pendukung yang diperlukan dalam implementasi. • Melaksanakan Bimtek dan pendampingan lanjutan bagi bendahara serta pengelola keuangan OPD yang masih memerlukan pemahaman teknis mengenai mekanisme SP2D Online dan KKPD. • Memperkuat koordinasi antara BPKAD/PPKD, OPD, bendahara, dan PT Bank Papua dalam penyelesaian kendala teknis maupun administratif selama proses implementasi. • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan implementasi SP2D Online dan KKPD pada OPD. • Memastikan penggunaan KKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peruntukan, kebutuhan,

	dan pagu anggaran yang tersedia serta didukung dengan mekanisme pengendalian internal yang memadai. • Memastikan aspek keamanan sistem, otorisasi transaksi, pengendalian internal, dan perlindungan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. • Menyusun laporan evaluasi implementasi secara berkala sebagai bahan bagi pimpinan dalam menentukan langkah perbaikan dan penguatan implementasi. • Mendorong agar digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada percepatan transaksi, tetapi juga pada peningkatan transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan belanja daerah.
Dokumentasi	-

Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP Tahun 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 10 Agustus 2026 Menara Bappenas, Jakarta
Sasaran Strategis sesuai IKU	1. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 2. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 3. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	1. Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 2. Indeks pelaksanaan komunikasi publik

Latar Belakang	Dalam rangka memperkuat sinergi implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029, diperlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian/Lembaga, Badan Pengarah Papua (BPP), dan Pemerintah Daerah. RAPPP Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan menjadi acuan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan Papua. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, masih terdapat program dan subkegiatan yang diusulkan melalui perencanaan daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan dan target RAPPP Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keselarasan perencanaan merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan sumber daya pembangunan, termasuk Dana Otonomi Khusus, dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dan target percepatan pembangunan Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Cerdas turut hadir dalam Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 dengan membawa bahan penguatan kebijakan penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan RAPPP sebagai bahan masukan dalam memperkuat implementasi RAPPP secara terpadu dan terarah.

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan bertujuan untuk mengikuti dan mendukung pelaksanaan koordinasi strategis dalam rangka sinergi implementasi RAPPP Tahun 2025–2029, menyampaikan masukan BPP terkait penguatan kebijakan penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan RAPPP, serta mendorong adanya kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan arah RAPPP. Selain itu, kegiatan bertujuan memperkuat peran BPP dalam mengawal proses sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi implementasi RAPPP bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga implementasi RAPPP dapat berjalan secara terpadu, terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan seluruh Wilayah/Provinsi. • Anggota Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Barat Daya (Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si). • Jajaran Kementerian PPN/Bappenas. • Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. • Kementerian Keuangan. • Kementerian Dalam Negeri.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif

	Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan berfokus pada penguatan sinergi dan kebersamaan para pihak dalam implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 serta pentingnya memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah mengacu pada arah kebijakan, sasaran, dan target RIPPP dan RAPPP. • BPP menyampaikan pentingnya penguatan kebijakan untuk mewujudkan keselarasan 100% program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus dengan RAPPP Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut diperlukan agar seluruh sumber daya pembangunan yang dialokasikan melalui Dana Otsus memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian target RAPPP. • Pembahasan juga menekankan perlunya penguatan instrumen kebijakan dan/atau regulasi perencanaan yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, termasuk dalam penyelenggaraan Musrenbang Otonomi Khusus, sehingga proses penyusunan program dan kegiatan dapat dilakukan secara konsisten dengan arah RAPPP, khususnya mulai perencanaan Tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. • BPP menegaskan komitmen untuk mengawal upaya pencapaian keselarasan 100% tersebut melalui pelaksanaan fungsi SHEK, bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya partisipasi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Cerdas dalam

	Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 serta tersampaikannya bahan penguatan kebijakan penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan RAPPP Tahun 2025–2029 sebagai masukan dalam penguatan sinergi implementasi RAPPP. • Terbangunnya pemahaman mengenai pentingnya keselarasan 100% program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus dengan RAPPP Tahun 2025–2029, khususnya dalam proses perencanaan Tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. • Menguatnya komitmen BPP untuk mengawal dan mendorong pencapaian keselarasan 100% melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. • Menguatnya perhatian terhadap perlunya instrumen kebijakan dan/atau regulasi perencanaan yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memastikan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus berkontribusi terhadap pencapaian target RAPPP.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk memperkuat kebijakan penyelarasan 100% program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus dengan RAPPP Tahun 2025–2029, khususnya dalam proses perencanaan Tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

	• Mendorong agar kebijakan penyelarasan 100% tersebut diperkuat melalui instrumen kebijakan dan/atau regulasi perencanaan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, termasuk dalam penyelenggaraan Musrenbang Otonomi Khusus. • BPP PBD melalui Pokja Cerdas menindaklanjuti hasil rapat melalui koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan pihak terkait dalam rangka mendukung pencapaian keselarasan 100% program dan kegiatan/subkegiatan daerah dengan RAPPP. • Memperkuat pelaksanaan fungsi SHEK BPP dalam mengawal penyelarasan program dan kegiatan bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP sebagai bahan tindak lanjut. • Mendorong agar komitmen keselarasan 100% tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi diterjemahkan dalam implementasi program yang terpadu, terarah, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target serta dampak nyata RAPPP bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. • Akan dilaksanakan pendampingan/asistensi hasil pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 oleh Tim Pengarah untuk wilayah/provinsi se-Tanah Papua.

Dokumentasi	 

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Badan Legislasi DPR RI di Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 10 Agustus 2026 Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	4. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 5. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 6. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif

IKU Pokja	3. Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 4. Indeks pelaksanaan komunikasi publik
Latar Belakang	Kunjungan kerja Kepala Badan Legislasi DPR RI di Papua Barat Daya merupakan bagian dari upaya memperoleh masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah terkait penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Dalam konteks Papua Barat Daya, keberadaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan wilayah, sumber daya, serta proses pembangunan di daerah. BPP Papua Barat Daya melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) turut berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap substansi Naskah Akademik UU Masyarakat Adat, khususnya terkait penguatan kedudukan masyarakat adat dalam proses pembangunan serta pentingnya kepastian mengenai keberadaan dan wilayah masyarakat adat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan bertujuan untuk mengikuti dan memberikan masukan dalam pembahasan Naskah Akademik UU Masyarakat Adat serta memastikan kepentingan masyarakat adat di Papua Barat Daya dapat menjadi bagian dari substansi kebijakan yang sedang disusun. Selain itu, kegiatan bertujuan mendorong penguatan kedudukan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, dengan didukung oleh data dan informasi yang jelas mengenai keberadaan masyarakat adat melalui proses pemetaan dan pendaftaran.

Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. • Kepala Badan Legislasi DPR RI beserta jajaran. • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta pemangku kepentingan terkait.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan berfokus pada masukan terhadap Naskah Akademik Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, khususnya mengenai penguatan kedudukan dan hak masyarakat adat dalam kerangka pembangunan. • Dalam pembahasan disampaikan pentingnya memastikan keberadaan masyarakat adat terlebih dahulu melalui proses pemetaan dan pendaftaran sebagai dasar untuk memberikan kepastian mengenai masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak yang melekat pada masyarakat adat. • Pembahasan juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang saham dalam pembangunan, dengan didahului oleh proses pemetaan, pendaftaran, dan pendataan yang jelas sebagai dasar dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya partisipasi aktif BPP Papua Barat Daya dalam Kunjungan Kerja Kepala Badan

	Legislasi DPR RI melalui penyampaian masukan terhadap Naskah Akademik UU Masyarakat Adat. • Terbangunnya pemahaman mengenai pentingnya penguatan kedudukan masyarakat adat dalam kebijakan dan proses pembangunan, termasuk memastikan masyarakat adat memperoleh posisi dan manfaat yang jelas dalam pembangunan. • Mengemukanya pandangan bahwa masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai pemegang saham dalam pembangunan, yang didahului dengan pemetaan, pendaftaran, dan pendataan sebagai dasar untuk memastikan keberadaan dan wilayah masyarakat adat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mendorong agar masyarakat adat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan, sehingga memiliki kedudukan dan peran yang jelas dalam setiap proses pembangunan yang berkaitan dengan wilayah dan kepentingannya. • Mendorong dilakukannya pemetaan, pendaftaran, dan pendataan masyarakat adat sebagai tahapan penting untuk memberikan kepastian mengenai keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak masyarakat adat. • BPP Papua Barat Daya perlu terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mengawal kepentingan masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan dan implementasi pembangunan. • Mendorong agar masukan mengenai kedudukan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan menjadi bagian yang diperhatikan dalam

	penyusunan Naskah Akademik dan kebijakan terkait masyarakat adat.
Dokumentasi	 

Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Lokakarya Pengembangan Sistem Data Terpilah OAP Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa-Rabu, 11-12 Agustus 2026 Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat
Sasaran Strategis sesuai IKU	7. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 8. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 9. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	5. Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 6. Indeks pelaksanaan komunikasi publik

Latar Belakang	Penyusunan data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara by name by address merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pembangunan, perlindungan, dan afirmasi terhadap OAP. Ketersediaan data yang akurat diperlukan agar program pembangunan dan kebijakan yang menyasar OAP dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan transparan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen mempercepat penyediaan data OAP sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menyasar OAP. Kebutuhan tersebut sejalan dengan Kesepakatan Timika Nomor 059/046/AKDH/2026, khususnya dalam mengoptimalkan Program Prioritas Strategis Bersama (PPSB) menuju Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dengan salah satu fokus utama berupa penyelesaian pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan non-OAP. Pendataan OAP juga memiliki posisi strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat Papua serta penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus agar lebih tepat sasaran. Data tersebut diarahkan untuk menjadi bagian dari ekosistem Satu Data Indonesia, termasuk melalui integrasi dengan data kependudukan dan data BPS. Di Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi melalui Bapperida dan BP3OKP berkomitmen

	mempercepat implementasi pendataan OAP melalui kolaborasi dengan program SKALA. Sistem pendataan sosial ekonomi OAP telah dikembangkan di beberapa wilayah Papua, termasuk SIOPADA di Papua Barat Daya. Untuk meningkatkan cakupan pendataan menuju 100 persen, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama BP3OKP akan memulai proses refresh pendataan di Kabupaten Raja Ampat dan selanjutnya dilanjutkan di kabupaten/kota lainnya. Atas dasar tersebut, dilaksanakan Lokakarya Pengembangan Sistem Pendataan Terpilah Sosial Ekonomi OAP Kabupaten Raja Ampat sebagai forum untuk memperkuat pemahaman, kelembagaan, sistem, kapasitas pelaksana, serta rencana implementasi pendataan OAP di Kabupaten Raja Ampat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan bertujuan mengawal percepatan pendataan terpilah OAP di Kabupaten Raja Ampat serta mendorong tersedianya basis data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, kegiatan bertujuan mendorong koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, OPD, distrik, kampung, kelurahan, Dukcapil, BPS, dan mitra pembangunan dalam penyelenggaraan sistem pendataan OAP. Kegiatan juga diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, aplikasi,

	pembiayaan, keamanan data, serta mekanisme pemutakhiran dan bagi pakai data. Dalam perspektif Papua Damai, data terpilah OAP diharapkan dapat mendukung penguatan hak sipil, hukum dan ketertiban masyarakat, afirmasi politik, kelembagaan dan demokrasi, serta akuntabilitas tata kelola dan perlindungan berbasis keamanan.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua (BPP) Papua Barat Daya (Anggota Pokja Papua Sehat: Rosaline Krimadi, Papua Cerdas: Helena Tuririday dan Dea Varena, Papua Produktif: Herman Tubur, dan Papua Polhukam: Grein Wutoy). • Bapperida Provinsi Papua Barat Daya. • Bappeda Kabupaten Raja Ampat. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Raja Ampat. • BPS Kabupaten Raja Ampat. • SKALA. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Raja Ampat, serta beberapa kecamatan/distrik.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan lokakarya merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Timika terkait pendataan terpilah

	OAP untuk menyusun langkah strategis dalam mendukung tata kelola Dana Otonomi Khusus. Kabupaten Raja Ampat diarahkan menjadi role model sistem pendataan OAP di Provinsi Papua Barat Daya, dengan dukungan data sosial yang kuat untuk membantu penyelesaian hak administrasi kependudukan OAP. • Pembahasan juga mencakup penyelarasan dokumen perencanaan pusat dan daerah melalui instrumen Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Aplikasi SEPAKAT dan pemanfaatan data mikro diarahkan untuk mendukung sensus kesejahteraan OAP dalam mendukung Misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai. • Dibahas pula kondisi kesesuaian RAPPP Kabupaten Raja Ampat yang pada saat kegiatan berada pada angka 56 persen serta pentingnya pendataan OAP sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data konkret atau evidence-based policy. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ditargetkan untuk meningkatkan cakupan pendataan. • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan pemanfaatan aplikasi SIAK Plus, dengan data kependudukan agregat sebagai basis data awal atau prelist yang selanjutnya diperkaya dengan indikator sosial ekonomi spesifik. • Pembahasan selanjutnya meliputi kebijakan dan strategi pendataan OAP, peluang integrasi dengan DTSEN, pentingnya data terpilah OAP dalam mendukung perencanaan pembangunan dari tingkat kampung hingga provinsi, serta kebijakan

	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menindaklanjuti Kesepakatan Timika. • Dibahas pula kondisi dan capaian pendataan OAP, pelaksana pendataan, tantangan dan hambatan, potensi kolaborasi antarpihak, serta dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam percepatan pendataan OAP. • Pada aspek sistem, pembahasan mencakup karakteristik dan nilai strategis sistem pendataan, hubungan dengan pendataan OAP/SIAK+, dukungan terhadap tata kelola Dana Otsus, dukungan terhadap program prioritas kepala daerah, pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran reguler, fitur dan variabel data, serta demonstrasi pemanfaatan data dalam SIOPADA berbasis studi kasus. • Pada aspek kelembagaan, dibahas siklus penyelenggaraan sistem pendataan OAP, kebutuhan regulasi, skenario pembentukan organisasi penyelenggara, perencanaan dan penganggaran, penguatan dukungan SKALA, serta penguatan peran distrik, kampung, kelurahan, dan kader dalam percepatan pendataan. • Aspek infrastruktur dan keamanan data juga menjadi bagian pembahasan, meliputi kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana pendataan, keamanan jaringan dan data, prinsip serta mekanisme bagi pakai data, dan mitigasi terhadap gangguan keamanan maupun aplikasi.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya partisipasi aktif BPP Papua Barat Daya dalam Lokakarya Pengembangan Sistem Pendataan Terpilah Sosial Ekonomi OAP Kabupaten Raja Ampat sebagai bagian dari

	pelaksanaan fungsi SHEK dalam mendukung percepatan pendataan OAP. • SIOPADA diperkenalkan sebagai platform utama integrasi data OAP dari tingkat kampung hingga provinsi, dengan fokus pada penyelesaian pendataan sosial ekonomi terpilah serta penguatan perlindungan sosial bagi OAP rentan. Terdapat pula usulan opsi penyesuaian nama sistem berupa SioRaja atau integrasi langsung ke platform induk SIOPADA. • Disepakati bahwa pendataan dilaksanakan pada Semester I setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi cuaca laut dan masa libur sekolah. Metode pengumpulan data menggunakan verifikasi berjenjang dengan kombinasi Moda PAPI berupa kuesioner kertas dan Moda CAPI melalui aplikasi telepon pintar. Variabel instrumen disesuaikan dengan variabel khusus DTSEN/Desil serta indikator lokal adat Papua. • Meningkatnya pemahaman peserta mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BPP dalam percepatan pendataan sosial ekonomi terpilah OAP serta meningkatnya kapasitas OPD, distrik, kelurahan, dan kampung dalam menggunakan aplikasi pendataan melalui simulasi pengisian data by name by address. • Teridentifikasinya kebutuhan kelembagaan, regulasi, infrastruktur, tata kelola, dan pembiayaan yang diperlukan untuk implementasi Sistem Pendataan Terpilah OAP Kabupaten Raja Ampat, serta diperolehnya masukan teknis untuk pengembangan aplikasi, termasuk variabel data,

	kebutuhan pengguna, keamanan data, dan mekanisme bagi pakai data. • Tersusunnya rekomendasi awal pengembangan kelembagaan dan implementasi Sistem Pendataan Terpilah OAP, termasuk rencana tindak lanjut yang disepakati bersama. Terbangunnya pemahaman bersama bahwa data OAP perlu menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kebijakan, serta teridentifikasinya kebutuhan penguatan peran distrik, kampung, kelurahan, dan kader dalam proses pendataan OAP.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mengembangkan SioRaja sebagai subsistem yang terintegrasi dan interoperabel dengan SIOPADA milik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. • Melakukan refresh pendataan sosial ekonomi OAP di Kabupaten Raja Ampat dan mendorong peningkatan cakupan pendataan menuju 100 persen, dengan memastikan data tersedia secara by name by address dan dapat dipertanggungjawabkan. • Menyediakan perangkat kerja bagi petugas lapangan, termasuk instrumen Moda PAPI untuk wilayah blank spot ekstrem serta aktivasi akun Moda CAPI untuk wilayah komuter. • Menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi petugas distrik dan kampung mengenai metode verifikasi berjenjang serta meningkatkan kapasitas OPD, distrik, kelurahan, kampung, dan kader dalam pengelolaan data. • Melaksanakan sensus lapangan dengan memanfaatkan waktu Semester I, khususnya

	periode Maret–Mei, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca laut dan masa libur sekolah sebagai faktor pendukung mobilisasi tim pendata. • Melibatkan BPS Kabupaten Raja Ampat dalam pengendalian mutu pengumpulan data lapangan serta melakukan rekonsiliasi data dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga provinsi untuk memastikan prinsip by name by address terpenuhi. • Mendorong penyusunan dan penetapan regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Sistem Pendataan Terpilah OAP, penetapan struktur penyelenggara, pembagian tugas antarpihak, serta penyusunan petunjuk teknis operasional pendataan. • Menyiapkan skema pembiayaan bersama antara provinsi, kabupaten/kota, dan kampung sesuai kebutuhan serta memastikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara berkelanjutan. • Memperkuat integrasi sistem dengan data kependudukan dan sumber data terkait, menyiapkan mekanisme keamanan jaringan dan data, serta menetapkan mekanisme bagi pakai data antarinstansi sesuai ketentuan yang berlaku. • Membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, menetapkan indikator capaian pendataan, mengevaluasi kualitas dan kelengkapan data, serta menjadikan hasil pendataan sebagai bahan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan serta evaluasi pemanfaatannya dalam program prioritas bagi OAP.

Dokumentasi	 

Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Rapat Persiapan Launching Pelaksanaan Program Strategis Nasional dan Pelantikan DPPP Perwakilan Pusat APPERINDO, APDESI, dan BP. TAZKIN Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 13 Agustus 2026 Balai Ruang Kantor Distrik Klamono, Kabupaten Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif.

	• Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Berdasarkan dokumen undangan/permohonan APPERINDO PBD kepada Wakil Presiden, pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat APPERINDO kepada Wakil Presiden dan balasan dari Setwapres. Dokumen APPERINDO memuat permohonan dukungan pembangunan kawasan transmigrasi di Distrik Klamono, Malabotom, dan Klasafet, terutama terkait infrastruktur dasar, perumahan, jalan, air bersih, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Wilayah APPERINDO Provinsi Papua Barat Daya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia terkait permohonan dukungan pembangunan kawasan transmigrasi di Distrik Klamono, Malabotom, dan Klasafet, diperlukan adanya pertemuan untuk membahas lebih lanjut kebutuhan dan usulan pembangunan di wilayah tersebut. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut atas balasan Surat Sekretariat Wakil Presiden terhadap surat APPERINDO tersebut, sehingga perlu dilakukan koordinasi bersama antara pihak terkait untuk menyamakan pemahaman, melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan, serta menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan. Adapun pembahasan difokuskan pada kebutuhan pembangunan perumahan, infrastruktur dasar, jalan,

	air bersih, serta pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 serta Perpres Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan nasional, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat tapak. Sesuai Pasal 4 huruf h dan i Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, strategi operasional percepatan pembangunan dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta penciptaan wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai. Atas dasar surat arahan dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang menindaklanjuti surat masuk dari DPPP APPERINDO Papua Barat Daya kepada Wakil Presiden RI, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melalui Tim Pokja melakukan langkah tindak lanjut lapangan. Pertemuan persiapan ini diselenggarakan di Klamono untuk mengoordinasikan rencana Peluncuran/Launching Pelaksanaan Program Strategis Nasional serta Pelantikan DPPP Perwakilan

	Pusat APPERINDO, APDESI, dan BP. TAZKIN Provinsi Papua Barat Daya. BP3OKP hadir untuk menjalankan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) agar setiap inisiatif kemitraan masyarakat dan organisasi profesi di tingkat distrik/kampung selaras dengan dokumen perencanaan strategis RAPPP Papua Barat Daya dan RIPPP Gabungan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Mengidentifikasi model program nasional yang dilaksanakan beserta kementerian terkait. • Menyosialisasikan lembaga BPP dan melaksanakan tugas serta fungsi SHEK BPP. • Menginventarisasi hambatan (belanja masalah) yang ada dalam pelaksanaan program pembangunan rumah di kawasan transmigrasi Klamono Raya. • Fungsi Koordinasi & Sinkronisasi: Memastikan kesiapan penyelenggaraan Rapat Persiapan Launching Pelaksanaan Program Strategis Nasional dan Pelantikan Pengurus DPPP APPERINDO, APDESI, dan BP. TAZKIN di Provinsi Papua Barat Daya agar sejalan dengan tata kelola pembangunan berbasis distrik dan kampung. • Fungsi Harmonisasi & Evaluasi: Melakukan pemetaan dan evaluasi partisipasi para pihak (stakeholders) yang diundang untuk menjamin keberlanjutan program kerja sama antara organisasi kemasyarakatan/asosiasi dengan pemerintah tingkat distrik dan TNI/Polri setempat. • Fungsi Konsolidasi Program: Menyelaraskan rencana aksi mitra pembangunan dengan kerangka Program Strategis Nasional serta

	program prioritas Papua Produktif dan Papua Damai.
Peserta Kegiatan	• Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya (Alberd Duwith). • Pokja Papua Damai BPP Papua Barat Daya (Virginus Turot). • Kepala Distrik Klamono – Pemerintah Daerah. • Perwakilan Koramil Klamono – Unsur Keamanan/TNI. • Anggota APPERINDO (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia).
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif Papua Polhukam

Poin-Poin Pembahasan	• Rencana Pembangunan Perumahan
	  • Program awal direncanakan sekitar 1.200 rumah, dengan sekitar 300 rumah yang telah terbangun dan terdapat sekitar 24 kontraktor dari APPERINDO yang siap mendukung pembangunan rumah.
	• Kesiapan dan Status Lahan
	  • Perlu memastikan status tanah, khususnya tanah eks transmigrasi, agar clean and clear.
	  • Perlu pendataan ulang kepemilikan dan sertifikat serta melengkapi titik koordinat lokasi.
	  • Dalam pembangunan perlu melibatkan pemilik hak ulayat untuk mencegah persoalan atau pemalangan di kemudian hari.
	• Penetapan Penerima Bantuan

	• Data penerima manfaat perlu diverifikasi kembali dengan kondisi nyata di lapangan. • Penetapan penerima harus mengacu pada ketentuan dan data pemerintah, termasuk data DTSN/desil. • Perlu komunikasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik terkait penerima bantuan. • Persiapan Pelaksanaan dan Launching • APPERINDO PBD sedang mendorong agar program 3 juta rumah dapat direalisasikan dan diupayakan untuk di-launching di Distrik Klamono. • Lokasi pembangunan awal sedang dipersiapkan, termasuk area di depan SMP Klamono. • Data calon penerima manfaat akan disiapkan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. • Peran BPP • BPP memperkenalkan tugas dan fungsinya dalam menyinkronkan program pembangunan di Papua dan membantu membuka hambatan pelaksanaan pembangunan. • Program pembangunan perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program. • BPP akan menindaklanjuti program perumahan ini dengan kementerian terkait dan melaporkan perkembangannya secara berjenjang kepada Setwapres sesuai mekanisme kerja. • Manfaat bagi Masyarakat • Pelaksanaan program harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan

	memperoleh manfaat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang RIPPP 2022–2041 serta Matriks RAPPP Papua Barat Daya (Lampiran VII), Misi Papua Produktif berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi, pemberdayaan wirausaha lokal/OAP, peningkatan produktivitas berbasis kampung, serta penguatan konektivitas dan investasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) BP3OKP Papua Barat Daya, hasil kegiatan rapat di Klamono ini dikaitkan dengan matriks program prioritas sebagai berikut: **A. Sinkronisasi (Synchronization)** • Keterkaitan Program: Misi Papua Produktif menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengusaha lokal/OAP dan UMKM serta percepatan pembangunan berbasis distrik dan kampung. • Penerapan Fungsi: BP3OKP menyinkronkan usulan kegiatan strategis dari APPERINDO, APDESI, dan BP. TAZKIN dengan prioritas program RIPPP/RAPPP Papua Barat Daya. Pelibatan pengusaha lokal (APPERINDO) diselaraskan dengan agenda kemitraan dunia usaha untuk mendorong rantai pasok lokal dan penyerapan tenaga kerja di tingkat distrik (Klamono). **B. Harmonisasi (Harmonization)**

	• Keterkaitan Program: Keberhasilan Misi Papua Produktif membutuhkan prasyarat stabilitas wilayah dan tata kelola yang baik (Misi Papua Damai dan Tata Kelola). • Penerapan Fungsi: Kehadiran bersama Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Damai, Kepala Distrik Klamono, dan Koramil Klamono menunjukkan upaya harmonisasi antara pengembangan ekonomi produktif dan aspek keamanan/kamtibmas di wilayah distrik. Hubungan harmonis antar-lembaga ini penting agar pelaksanaan program strategis nasional tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun gesekan di tingkat kampung. **C. Evaluasi (Evaluation)** • Keterkaitan Program: Penguatan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis kinerja. • Penerapan Fungsi (Temuan Evaluasi): BP3OKP memberikan catatan evaluasi kritis atas ketidakhadiran APDESI dan BP. TAZKIN dalam pertemuan ini. Mengingat surat arahan Sekretariat Wakil Presiden diterbitkan guna menindaklanjuti permohonan APDESI, ketidakhadiran unsur APDESI di lapangan menunjukkan masih lemahnya koordinasi internal dan komitmen organisasi di tingkat bawah. BP3OKP merekomendasikan re-evaluasi atas kesiapan APDESI dan BP. TAZKIN sebelum jadwal launching resmi dan pelantikan pengurus dilaksanakan, agar

	pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa/kampung benar-benar memiliki kepemimpinan (ownership) yang jelas. **D. Koordinasi (Coordination)** • Keterkaitan Program: Kemitraan multipihak (multi-stakeholder partnership) yang melibatkan Pemerintah Pusat (Setwapres/BP3OKP), Pemerintah Daerah (Distrik), TNI/Polri, serta asosiasi profesi/dunia usaha. • Penerapan Fungsi: Pokja Papua Produktif BP3OKP PBD memfasilitasi koordinasi lintas sektor di Klamono untuk memastikan bahwa program-program strategis nasional yang akan diluncurkan memiliki landasan operasional yang kuat, terkoordinasi dengan Kepala Distrik sebagai penguasa wilayah administrasi, serta didukung oleh keamanan setempat (Koramil Klamono).
Hasil Kegiatan	• Terjadi kesepahaman dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah di wilayah Klamono dan perlunya penyiapan data penerima manfaat, status tanah, sertifikat, serta koordinat lokasi pembangunan. • Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu melibatkan pemilik hak ulayat untuk memastikan lahan aman dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. • Pelaksanaan program ini perlu kolaborasi antarpemangku kepentingan dan akan dipastikan model pelaksanaannya pada tingkat Pemda hingga pemerintah pusat. • Terpetakannya kesiapan pemangku kepentingan di lapangan: Kegiatan ini berhasil memfasilitasi

	koordinasi awal antara Tim Pokja BP3OKP (Papua Produktif dan Papua Damai), Kepala Distrik Klamono, Koramil Klamono, dan APPERINDO untuk persiapan peluncuran program strategis nasional dan pelantikan pengurus. • Temuan evaluasi kepatuhan dan komitmen organisasi: Teridentifikasi bahwa unsur yang diklaim dari BP. TAZKIN dan DPPP APPERINDO Provinsi Papua Barat Daya adalah orang yang sama, dan pada saat kegiatan tidak hadir di lokasi acara, melainkan hanya mengikuti acara secara daring melalui panggilan telepon/WhatsApp. Hal ini menjadi temuan evaluasi kritis bagi BP3OKP, mengingat kegiatan ini pada dasarnya ditindaklanjuti berdasarkan arahan surat Setwapres atas permohonan DPPP APPERINDO Provinsi Papua Barat Daya. • Terbangunnya komitmen harmonisasi lintas sektor: Terwujudnya kesepahaman antara Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Damai, pemerintah distrik, dan unsur TNI (Koramil Klamono) mengenai pentingnya menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi dengan aspek keamanan dan ketertiban di tingkat dasar. • Ditemukan bahwa persyaratan dasar bantuan perumahan bagi masyarakat belum terpenuhi, yakni: 1) sertifikat lahan bagi para penerima bantuan; dan 2) pendataan desil yang belum dilakukan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon penerima bantuan berdasarkan kondisi di lapangan dan data pemerintah.

	• Melakukan pendataan dan pengecekan status lahan, termasuk sertifikat dan koordinat lokasi pembangunan. • Melakukan koordinasi dengan pemilik hak ulayat, pemerintah distrik, dan kampung untuk memastikan kesiapan lokasi. • APPERINDO menyiapkan data penerima manfaat, lokasi, dan kebutuhan pembangunan sebagai bahan tindak lanjut program. • BPP akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan, mekanisme, dan pelaksanaan program perumahan. • Hasil perkembangan akan dilaporkan secara berjenjang kepada Setwapres sebagai tindak lanjut hasil koordinasi. • Penyelarasan Program Matriks RAPPP: Seluruh program kerja APPERINDO, APDESI, dan BP. TAZKIN yang akan diluncurkan wajib dikaji ulang oleh Pokja Papua Produktif agar selaras dengan indikator sasaran RIPPP 2022–2041, khususnya terkait pengentasan kemiskinan perdesaan, pemberdayaan ekonomi OAP, dan peningkatan pendapatan masyarakat kampung di Kabupaten Sorong/Provinsi Papua Barat Daya. • Rekomendasi Penundaan/Klarifikasi Sebelum Launching: Dihasilkannya arahan tindak lanjut (action plan) bagi BP3OKP untuk memanggil/mengklarifikasi komitmen pengurus APDESI dan BP. TAZKIN, serta mereviu seluruh rencana program kerja mereka agar benar-benar selaras dengan matriks RAPPP/RIPPP sebelum

	jadwal pelantikan dan peluncuran resmi dilaksanakan.
Dokumentasi	 

Kegiatan 9

Nama Kegiatan	SHEK Tematik Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 13 Agustus 2026 Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat

Sasaran Strategis sesuai IKU	10. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 11. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 12. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	7. Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 8. Indeks pelaksanaan komunikasi publik
Latar Belakang	Pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), serta penguatan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaannya, diperlukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program Otsus telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pencapaian sasaran maupun dampaknya terhadap masyarakat. Kabupaten Raja Ampat memiliki berbagai potensi strategis yang dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Potensi tersebut perlu dikelola secara terarah, akuntabel, dan selaras dengan Grand Design Pembangunan Papua serta dokumen perencanaan pembangunan Papua, termasuk RIPPP dan RAPPP. Sehubungan dengan hal tersebut, SHEK Tematik bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan dialog untuk

	memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus, capaian pembangunan, pemanfaatan dana Otsus, berbagai kendala yang dihadapi, serta kebutuhan penguatan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya BPP PBD dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi terhadap pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua, khususnya dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi OAP dan selaras dengan arah pembangunan Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan SHEK Tematik bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus serta mengidentifikasi capaian, permasalahan, tantangan, dan kebutuhan penguatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program Otsus dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan arah pembangunan Papua. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mengidentifikasi program dan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat,

	khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi produktif, serta menginventarisasi isu strategis yang membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut lebih lanjut. SHEK Tematik juga bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPP PBD dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Otsus, memperkuat tata kelola, serta memastikan program pembangunan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya OAP.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua (BPP) Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Kelompok Kerja). • Bupati Raja Ampat Orideki Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev., Wakil Bupati Raja Ampat Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat Muhidin Tafalas, serta pimpinan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif

	Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan kegiatan diarahkan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Otonomi Khusus di Kabupaten Raja Ampat, termasuk kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah dan arah pembangunan Papua. • Dalam pembahasan disampaikan bahwa pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua yang berada dalam koridor RIPPP di Kabupaten Raja Ampat memiliki tingkat keselarasan sebesar 56% terhadap RAPPP. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka memperkuat keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan arah pembangunan Papua. • Pembahasan juga mencakup pelaksanaan indikator pembangunan pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang memberikan dampak terhadap masyarakat OAP. • Pada bidang kesehatan dibahas kondisi dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan serta kebutuhan penguatan pelayanan dasar agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik geografis Kabupaten Raja Ampat. • Pada bidang pendidikan dibahas upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

	pembangunan dan penguatan sektor pendidikan, termasuk pentingnya perencanaan program pendidikan yang selaras dengan kebutuhan daerah dan arah pembangunan Papua. • Pada bidang produktif dibahas pemanfaatan potensi daerah sebagai peluang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pentingnya pengelolaan potensi daerah secara terarah, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. • Selain itu, dibahas pula pelaksanaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam kesempatan tersebut disampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Otsus hingga tahap kedua, yang menjadi kabupaten pertama di wilayah Papua Barat Daya yang memenuhi persyaratan tersebut. • Pembahasan turut menyoroti isu tanah ulayat dan tanah adat, termasuk pentingnya pemetaan masyarakat adat dan wilayah hak ulayat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian data serta mendukung perencanaan pembangunan yang memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat adat. • Secara umum, pembahasan menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas data, keselarasan perencanaan dan penganggaran, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan orientasi program pembangunan pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat OAP.

Hasil Kegiatan	• Terlaksananya SHEK Tematik bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagai forum evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus serta diperolehnya gambaran mengenai pelaksanaan program pembangunan yang didukung kebijakan Otsus di Kabupaten Raja Ampat. • Teridentifikasinya tingkat keselarasan program percepatan pembangunan Papua di Kabupaten Raja Ampat terhadap RAPPP serta perlunya penguatan keselarasan program dan kegiatan daerah dengan arah pembangunan Papua • Teridentifikasinya berbagai capaian, potensi, permasalahan, dan kebutuhan penguatan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi produktif sebagai bagian dari pelaksanaan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. • Diperolehnya informasi mengenai pelaksanaan dan pengelolaan Dana Otsus di Kabupaten Raja Ampat, termasuk capaian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Otsus tahap kedua • Teridentifikasinya isu strategis terkait masyarakat adat, tanah ulayat, serta kebutuhan pemetaan masyarakat adat sebagai salah satu bahan pendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. • Terbangunnya komunikasi, koordinasi, dan kesepahaman antara BPP PBD dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus dan program percepatan pembangunan Papua.

	• Tersedianya bahan evaluasi dan masukan yang dapat digunakan dalam penyusunan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan Otsus di Kabupaten Raja Ampat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• BPP PBD melalui pelaksanaan SHEK perlu melanjutkan pemantauan dan koordinasi terhadap pembangunan di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan semakin selaras dengan RAPPP serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat OAP. • Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi produktif, termasuk terhadap berbagai permasalahan yang memerlukan dukungan dan koordinasi lebih lanjut. • Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu memperkuat keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan RAPPP, termasuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. • Perlu segera didorong pelaksanaan pemetaan masyarakat adat dan wilayah hak ulayat secara partisipatif sebagai bagian dari penguatan data dan dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. • BPP PBD perlu melakukan koordinasi dan pemantauan lebih lanjut terhadap hasil evaluasi

	serta menginventarisasi isu strategis yang membutuhkan tindak lanjut pada tingkat provinsi maupun nasional. • Hasil pelaksanaan SHEK Tematik selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi dan rencana aksi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan tindak lanjut masing-masing pihak.
Dokumentasi	

Kegiatan 10

Nama Kegiatan	Pembukaan dan Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 (Asistensi Bappenas - BPP)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu-Sabtu dan Senin, 19-22 (Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan Hotel Aston) 24 Agustus 2026 (Daring/Zoom Meetings)
Sasaran Strategis sesuai IKU	13. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 14. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 15. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif

IKU Pokja	9. Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 10. Indeks pelaksanaan komunikasi publik
Latar Belakang	Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan di Tanah Papua yang perlu diarahkan agar selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RAPPP Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mendukung Program Percepatan, memiliki sasaran dan indikator yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam rangka memperbaiki hasil evaluasi pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026, dilaksanakan pendampingan dan asistensi oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama BPP kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Pendampingan diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyelarasan program dan kegiatan, melakukan pendalaman terhadap usulan Pemerintah Daerah, serta mendorong penyelesaian perbaikan keselarasan dengan RAPPP Tahun 2025–2029. BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari Tim Koordinasi Strategis Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor

	KEP.56/M.PPN/HK/06/2026 dan memiliki peran dalam sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi implementasi RAPPP. Dalam rangkaian pendampingan tersebut, BPP berperan sebagai tim asistensi teknis di daerah dan turut mengawal proses penyelarasan agar tidak berhenti pada penyelesaian dokumen atau Berita Acara, tetapi dilanjutkan hingga tahap implementasi.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki hasil evaluasi Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 serta mendorong tercapainya 100% keselarasan program dan kegiatan dengan RAPPP Tahun 2025–2029. Kegiatan juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam proses penyelarasan, termasuk ketidaksesuaian program dengan RAPPP, ketepatan kewenangan, ketepatan sasaran OAP, potensi tumpang tindih program, serta permasalahan referensi subkegiatan yang digunakan dalam proses perbaikan. Selain itu, pendampingan diarahkan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah agar RAPPP digunakan sebagai acuan sejak tahap awal penyusunan program, sehingga proses penyelarasan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir setelah program selesai disusun.

	Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antara BPP, Bappenas, Bapperida, dan OPD Pemerintah Daerah dalam mengawal hasil asistensi sampai pada tahap implementasi dan memastikan keselarasan program berorientasi pada output, outcome, serta manfaat pembangunan bagi OAP.
Peserta Kegiatan	• Badan Pengarah Papua (BPP) Papua Barat Daya (Anggota BPP dan Kelompok Kerja). • Kementerian PPN/Bappenas. • Korsupgah KPK. • Kementerian Keuangan. • Bapperida se-Provinsi Papua Barat Daya, serta OPD teknis lainnya.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Pendampingan membahas perkembangan hasil penyelarasan program dan kegiatan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat Daya dengan RAPPP Tahun 2025–2029. Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat telah menyelesaikan proses penyelarasan dan menandatangani Berita Acara Keselarasan 100% pada 21 Agustus 2026. Selanjutnya proses tersebut disusul oleh Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw telah menyelesaikan

	pembahasan pada 24 Agustus 2026 dan berada dalam proses penandatanganan Berita Acara Keselarasan. • Dalam proses pendampingan masih ditemukan bahwa sebagian usulan program dan kegiatan disusun belum sepenuhnya mengacu pada Program Percepatan yang terdapat dalam RAPPP. Beberapa usulan masih disusun secara tidak terarah dan baru dicocokkan dengan RAPPP setelah program selesai dirumuskan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian usulan tidak selaras dengan RAPPP, padahal setiap Program Percepatan telah memiliki sasaran dan indikator sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan Papua. • Pembahasan juga menemukan bahwa perencanaan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kebutuhan dan hasil. Terdapat usulan yang berpotensi tidak dapat diakomodasi karena ketidaktepatan substansi atau bahasa program serta terdapat usulan yang berpotensi masuk dalam kategori negative list. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan sejak tahap awal. • Aspek kewenangan juga menjadi salah satu perhatian dalam proses penyelarasan. Dalam uji petik ditemukan adanya OPD Provinsi yang mengusulkan program atau kegiatan yang bukan merupakan kewenangan Provinsi. Di sisi lain, terdapat kewenangan Provinsi berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 yang belum tersedia secara jelas dalam Matriks RAPPP. Salah satu contoh yang ditemukan adalah kewenangan Provinsi

	dalam bidang penanaman modal yang belum memiliki padanan yang jelas dalam RAPPP Papua Barat Daya. • Selain itu, ditemukan bahwa referensi subkegiatan yang digunakan dalam proses perbaikan belum seluruhnya memiliki padanan yang jelas dalam Matriks RAPPP Papua Barat Daya. Oleh karena itu, proses penyelarasan perlu memperhatikan substansi program dan keterkaitannya dengan Program Percepatan, bukan hanya mencocokkan nomenklatur kegiatan. • Pembahasan turut mengidentifikasi potensi duplikasi kegiatan dan inefisiensi anggaran akibat adanya perencanaan yang memecah kegiatan. Kondisi tersebut perlu diperbaiki melalui pembinaan apabila disebabkan oleh ketidakpahaman penyusun, serta perlu menjadi perhatian dari sisi tata kelola apabila dilakukan secara sengaja untuk menyiasati program atau kegiatan. • Fungsi koordinasi perencanaan Bapperida/Bappeda juga perlu diperkuat sebagai orkestrator perencanaan lintas OPD. Penyelarasan perlu ditempatkan sebagai satu kesatuan proses perencanaan Pemerintah Daerah, bukan dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD. • Dalam pembahasan juga ditekankan perlunya membedakan antara program yang bukan merupakan kewenangan Provinsi dan kewenangan Provinsi yang belum terakomodasi dalam RAPPP. Kewenangan Provinsi yang telah diberikan berdasarkan regulasi tetapi belum terdapat dalam

	RAPPP perlu diidentifikasi sebagai bahan penyempurnaan atau revisi terbatas RAPPP. • Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah pada Kabupaten Tambrauw, di mana hampir seluruh usulan telah selaras, namun masih terdapat persoalan pada satu program pelayanan kesehatan penderita campak. Dalam penelaahan lebih lanjut ditemukan keterkaitan dengan Program PPSB Misi Papua Cerdas yang belum terlihat secara jelas dalam program yang dimasukkan ke SIPPP. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelarasan perlu melihat hubungan antara program, misi, indikator, dan sasaran penerima manfaat. Selain itu, menu dalam RAPPP/SIPPP terkait Akademi Komunitas juga belum terlihat, meskipun merupakan kewenangan Provinsi. • Secara umum, hasil pendampingan menunjukkan bahwa tantangan implementasi RAPPP tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga dengan kualitas perencanaan dan kapasitas birokrasi dalam menerjemahkan arah kebijakan ke dalam program. Program yang tidak mengacu pada Program Percepatan, tidak sesuai kewenangan, terfragmentasi antar-OPD, atau tidak memiliki sasaran dan indikator yang jelas berpotensi menyebabkan anggaran Otsus tidak menghasilkan outcome yang optimal.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya pendampingan dan asistensi teknis bersama Bappenas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 dan penyelarasan program serta kegiatan dengan RAPPP Tahun 2025–2029.

	• Tercapainya keselarasan 100% antara program dan kegiatan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat dengan RAPPP serta telah ditandatanganinya Berita Acara Keselarasan pada 21 Agustus 2026. Proses penyelarasan juga telah dilanjutkan pada Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw telah menyelesaikan pembahasan pada 24 Agustus 2026. • Teridentifikasinya berbagai permasalahan dalam proses perencanaan dan penyelarasan, antara lain program yang belum mengacu pada Program Percepatan RAPPP sejak awal perencanaan, ketidaktepatan kewenangan, referensi subkegiatan yang belum sepenuhnya memiliki padanan dalam Matriks RAPPP, potensi duplikasi kegiatan, serta perlunya penguatan koordinasi perencanaan lintas OPD. • Terbangunnya pemahaman bahwa 100% keselarasan RAPPP merupakan prasyarat dalam proses perencanaan, namun keberhasilan pembangunan tetap harus dilihat dari terlaksananya program, tercapainya output, serta manfaat yang dirasakan oleh OAP. • Menguatnya peran BPP PBD sebagai bagian dari Tim Koordinasi Strategis Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029 sekaligus sebagai tim asistensi teknis di daerah dalam mendampingi Pemerintah Daerah menyelesaikan proses keselarasan dan mengawal tindak lanjut hasil pendampingan sampai tahap implementasi.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Bapperida/Bappeda perlu memperkuat fungsi orkestrasi dan pengendalian perencanaan lintas OPD agar proses penyusunan program pembangunan menjadi satu kesatuan perencanaan Pemerintah Daerah. • RAPPP perlu digunakan sebagai acuan sejak awal penyusunan program dan kegiatan, bukan hanya pada saat program telah selesai disusun dan memasuki tahap penyelarasan. • Setiap OPD perlu memastikan bahwa usulan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya serta mendukung Program Percepatan yang terdapat dalam RAPPP. • Program dan kegiatan yang berpotensi tumpang tindih perlu dipetakan dan disatukan sejak tahap perencanaan untuk mencegah duplikasi kegiatan dan inefisiensi anggaran. • Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi tetapi belum terakomodasi dalam RAPPP perlu diidentifikasi sebagai bahan penyempurnaan atau revisi terbatas RAPPP. • Seluruh proses perencanaan dan penyelarasan perlu berorientasi pada kebutuhan OAP dan hasil pembangunan, bukan semata-mata pada jumlah program atau tingkat serapan anggaran. • BPP PBD akan melanjutkan pendampingan dan pengawalan bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bappenas, Bapperida, dan OPD terkait sampai seluruh daerah mencapai 100% keselarasan serta seluruh Berita Acara Keselarasan ditandatangani. • BPP juga akan mengawal agar hasil asistensi dan penyelarasan tidak berhenti pada penyelesaian

	dokumen, tetapi diterjemahkan ke dalam implementasi program yang tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi OAP.
Dokumentasi	  






ASTON
ASTON
Galaxy A17 5G

Kegiatan 11

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD pada Kegiatan Lokakarya Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus & DTI Tahap II TA 2026 & Workshop Penyusunan RAP Awal Dana Otsus TA 2027 melalui Aplikasi Interoperabilitas (Batch 2)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat–Sabtu, 21–22 Agustus 2026 Rylich Panorama Hotel Sorong
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output. • Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif. • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif.
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun 2026 kepada sebagian besar pemerintah daerah di Tanah Papua mengalami keterlambatan. Salah satu penyebabnya adalah belum selesainya RAP Perubahan 2026 dan RAP Awal 2027 yang menjadi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 33 Tahun 2024. Berdasarkan jadwal, penyaluran tahap II seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2026. Untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut, Kementerian Keuangan melalui DJPK melakukan pendampingan langsung kepada pemerintah daerah di Tanah Papua. Pendampingan dilaksanakan di Jayapura dan Sorong, dengan kegiatan di Sorong sebagai pendampingan tahap

	kedua, untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan RAP serta memastikan penyaluran Dana Otsus dapat segera dilakukan. Kegiatan ini juga menjadi penting untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP). Proses penyusunan RAP turut dikawal oleh KPK sebagai upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Mengoordinasikan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait agar penyelesaian RAP Perubahan 2026 dan RAP Awal 2027 dapat dipercepat.
Peserta Kegiatan	• Pemerintah daerah se-Tanah Papua melalui BPKAD dan Bappeda masing-masing yang hadir; • Anggota Pokja Polhukam BPP (Virginus Senau Air Turot, B.Sc); dan • Tim Skala sebagai fasilitator.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam

Poin-Poin Pembahasan	• Keterlambatan penyaluran Dana Otsus Tahap II Tahun 2026 akibat belum lengkapnya RAP Perubahan 2026 dan RAP Awal 2027. • Pendampingan DJPK Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian persyaratan salur pemerintah daerah. • Pemenuhan persyaratan salur secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. • Perkembangan penyaluran Dana Otsus Tahap II. Di Papua Barat Daya, baru Kabupaten Raja Ampat yang telah menerima penyaluran. Secara umum, sebanyak 19 pemda di Tanah Papua telah menerima penyaluran Dana Otsus Tahap II. • Pengawalan penyusunan RAP oleh KPK untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran Dana Otsus. • Perlunya koordinasi dan konsultasi lanjutan antara pemerintah daerah dengan DJPK untuk menyelesaikan persyaratan yang masih belum lengkap.
Hasil Kegiatan	• Pemerintah daerah mendapatkan penjelasan dan pendampingan terkait penyelesaian RAP Perubahan 2026 dan RAP Awal 2027 sebagai syarat penyaluran Dana Otsus Tahap II. • Terjadi peningkatan pemenuhan syarat salur; sebanyak 19 pemda di Tanah Papua telah memenuhi persyaratan dan Dana Otsus Tahap II mulai disalurkan. • Di Papua Barat Daya, Kabupaten Raja Ampat telah menerima penyaluran Dana Otsus Tahap II, sementara pemda lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan.

	• Pemda yang belum lengkap persyaratannya diarahkan untuk melakukan konsultasi lanjutan dengan DJPK Kementerian Keuangan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Mendorong Pemda di Papua segera menyelesaikan RAP Perubahan 2026 dan RAP Awal 2027. • Pemda yang syarat salurnya belum lengkap dapat melakukan koordinasi dan konsultasi lanjutan dengan DJPK Kementerian Keuangan melalui Zoom. • Mendorong percepatan pemenuhan dan pengesahan berita acara sebagai bagian dari kelengkapan syarat salur. • Mendorong penyaluran Dana Otsus Tahap II bagi pemda yang melengkapi syarat salurnya dalam dua hari ke depan, dengan tenggat waktu pencairan pada hari Rabu, 26 Agustus 2026.
Dokumentasi	

Kegiatan 12

Nama Kegiatan	SHEK BPP PBD pada Kegiatan Rapat Virtual Kemendagri terkait Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 27 Agustus 2026 Virtual/Daring (Zoom Meetings)
Sasaran Strategis sesuai IKU	16. Terlaksananya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output 17. Terlaksananya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif 18. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	11. Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua 12. Indeks pelaksanaan komunikasi publik
Latar Belakang	Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah

	Papua. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana Otsus dilakukan secara bertahap dan setiap tahapan memiliki persyaratan penyaluran yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hingga pelaksanaan kegiatan, sebagian besar Pemerintah Daerah di Tanah Papua masih berada pada proses pemenuhan persyaratan untuk penyaluran Dana Otsus Tahap II. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena keterlambatan penyaluran dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemanfaatan anggaran yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh arahan mengenai status dan percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi persyaratan, kendala, serta langkah yang perlu dilakukan agar proses penyaluran dapat berjalan sesuai ketentuan. Penguatan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, BPP, dan Pemerintah Daerah diperlukan untuk mendukung tata kelola Otsus yang lebih efektif, sekaligus memastikan pemanfaatan Dana Otsus dan DTI dapat mendukung pencapaian

	prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait status dan percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengidentifikasi persyaratan serta kendala dalam proses penyaluran, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera memenuhi setiap tahapan administrasi yang diperlukan. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk memperkuat peran koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Otsus sehingga penyalurannya dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
Peserta Kegiatan	Wakil Menteri Dalam Negeri, BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, BPP Perwakilan Papua Tengah dan Papua Selatan, KEPPP, Gubernur se-Tanah Papua beserta jajaran teknisnya, serta Pemerintah Daerah terkait.
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat

	Papua Cerdas Papua Produktif Papua Polhukam (Damai) dan/ atau Prasyarat Pembangunan/Kondisi Perlu
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan difokuskan pada percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2026, termasuk pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi yang menjadi dasar penyaluran pada masing-masing tahapan. • Dibahas pula kondisi penyaluran Dana Otsus di Tanah Papua serta berbagai kendala yang menyebabkan sebagian Pemerintah Daerah belum memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II. Setiap tahapan penyaluran Dana Otsus memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi agar proses penyaluran dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. • Dalam rapat juga dibahas pentingnya peran Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan dalam melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap kinerja aparatur serta memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. • Pembahasan turut menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan BPP dalam memperkuat tata kelola Otsus serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala dalam proses penyaluran. • Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus dan DTI perlu tetap memperhatikan aspek

	pengawasan, akuntabilitas, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Hasil Kegiatan	• Diperolehnya informasi mengenai mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Otsus, dengan pola penyaluran Tahap I sebesar 30%, Tahap II sebesar 45%, dan Tahap III sebesar 25%, di mana masing-masing tahapan memiliki persyaratan penyaluran. Berdasarkan hasil pembahasan, penyaluran Tahap I dilaksanakan pada bulan April, Tahap II pada bulan Juni, dan Tahap III pada bulan November. • Teridentifikasi bahwa sebanyak 19 Pemerintah Daerah telah memperoleh penyaluran Dana Otsus Tahap II, yang terdiri atas 2 pemerintah provinsi dan 17 pemerintah kabupaten. Untuk wilayah Papua Barat Daya, Kabupaten Raja Ampat tercatat telah memenuhi proses penyaluran Tahap II. • Masih terdapat 29 Pemerintah Daerah yang belum memenuhi persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap II sehingga diperlukan percepatan pemenuhan persyaratan dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah masing-masing. • Terbangunnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat proses penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026. • Diperolehnya arahan yang menjadi bahan bagi BPP PBD dalam melaksanakan pemantauan dan koordinasi lebih lanjut terhadap perkembangan penyaluran serta pemenuhan persyaratan oleh Pemerintah Daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• Perlu dilakukan pertemuan dan evaluasi secara rutin untuk memantau perkembangan pemenuhan

	persyaratan dan penyaluran Dana Otsus serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah. • Pemerintah Daerah perlu segera melakukan pengecekan dan pemenuhan seluruh persyaratan administrasi penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026 serta menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri. • Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait apabila terdapat kendala dalam proses pemenuhan persyaratan maupun penyaluran dana. • Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur, khususnya dalam mendukung proses perencanaan, pengelolaan, pemenuhan persyaratan, dan pengawasan Dana Otsus. • BPP PBD perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan penyaluran Dana Otsus dan DTI serta mendorong percepatan penyelesaian persyaratan oleh Pemerintah Daerah. • Pemanfaatan Dana Otsus dan DTI perlu terus dikawal agar sesuai dengan ketentuan dan mendukung prioritas pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.
Dokumentasi	-

Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Peran Aktif SHEK BPP pada Kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan (Monevdalwas) Implementasi RAPPP Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	31 Agustus 2026 Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Sasaran Strategis sesuai IKU	• Terlaksanakannya SHEK Program Percepatan Pembangunan Papua yang berorientasi output • Terlaksanakannya pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua yang efektif • Terwujudnya komunikasi publik yang efektif
IKU Pokja	• Indeks rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan. • Indeks efektivitas pembinaan implementasi program percepatan pembangunan Papua. • Indeks pelaksanaan komunikasi publik.
Latar Belakang	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan (Monevdalwas) implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 untuk Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari proses pendampingan dan asistensi penyelarasan hasil Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 dengan RAPPP 2025–2029 yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama Bappenas, BPP, Pemerintah

	Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya. Dalam proses tersebut, masih diperlukan penguatan terhadap penyelarasan program dan subprogram yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dengan RAPPP. Oleh karena itu, pelaksanaan FGD Monevdalwas menjadi forum untuk melakukan pendalaman, memperoleh masukan dari Bappenas dan BPP, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil penyelarasan pada tahap pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, BPP melaksanakan fungsi SHEK dengan memberikan masukan dan pengawalan terhadap proses penyelarasan serta mendorong agar hasil penyelarasan tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan program pembangunan di Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	• Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 untuk Tahun 2026, khususnya dalam melihat keselarasan program dan subprogram yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya. • Kegiatan juga bertujuan untuk menindaklanjuti proses pencapaian 100% keselarasan program dan subprogram Pemerintah Daerah dengan

	RAPPP serta memberikan ruang bagi Bappenas dan BPP untuk menyampaikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memperbaiki dan memperkuat keselarasan program. • Selain itu, kegiatan diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan implementasi program serta memastikan hasil penyelarasan dapat ditindaklanjuti oleh OPD melalui pengisian matriks monitoring dan evaluasi Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	• Anggota BPP Papua Barat Daya • Pokja Papua Sehat: Rosaline Krimadi, Alouisius Uspessy • Pokja Papua Cerdas (Daring): Helena Tuririday • Pokja Papua Produktif: Herman Tubur, Alberd Duwith • Pokja Papua Damai: Grein Wutoy • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya • Kementerian PPN/Bappenas
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	• Pembahasan difokuskan pada penyelarasan program dan subprogram di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan RAPPP Tahun 2025–2029 sebagai tindak lanjut dari proses asistensi dan pendampingan hasil evaluasi Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026. • Dalam forum tersebut, Bappenas dan BPP memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait program dan subprogram yang perlu diselaraskan dengan RAPPP. Masukan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan daerah dengan Program Percepatan Pembangunan Papua sehingga pelaksanaan program memiliki arah dan sasaran yang jelas.

	• FGD juga menjadi forum untuk melakukan pendalaman terhadap hasil sinkronisasi program yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Bappenas dan BPP. OPD yang telah melakukan proses sinkronisasi diarahkan untuk menuangkan hasil tersebut ke dalam matriks Monevdalwas sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi implementasi RAPPP Tahun 2026. • Pembahasan turut menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses monitoring dan evaluasi, karena keberhasilan implementasi RAPPP tidak hanya ditentukan oleh keselarasan dokumen perencanaan, tetapi juga oleh tindak lanjut dan pelaksanaan program di daerah.
Hasil Kegiatan	• Terlaksananya Focus Group Discussion dalam rangka Monevdalwas implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 untuk Tahun 2026 sebagai tindak lanjut proses pendampingan dan asistensi penyelarasan hasil Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026. • Diperolehnya masukan dari Bappenas dan BPP kepada Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya dalam rangka memperkuat penyelarasan program dan subprogram dengan RAPPP. • Teridentifikasinya kebutuhan untuk memastikan hasil sinkronisasi program yang telah dilakukan oleh OPD dapat ditindaklanjuti dalam proses monitoring dan evaluasi implementasi RAPPP Tahun 2026. • Tersusunnya arahan bagi OPD yang telah melakukan sinkronisasi program untuk melakukan pengisian matriks Monevdalwas sebagai bahan monitoring dan evaluasi implementasi RAPPP di Papua Barat Daya. • Terbangunnya komunikasi dan koordinasi antara BPP, Bappenas, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengawal implementasi RAPPP dan memastikan proses penyelarasan dapat ditindaklanjuti pada tahap pelaksanaan.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	• OPD Pemerintah Provinsi yang telah melakukan sinkronisasi program dengan Bappenas dan BPP perlu segera melakukan pengisian matriks Monevdalwas implementasi RAPPP Tahun 2026 sebagai bahan monitoring dan evaluasi. • Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi internal dan memastikan hasil penyelarasan program dengan RAPPP menjadi bagian dari proses pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan program pembangunan. • BPP bersama Bappenas perlu terus melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil penyelarasan, termasuk memastikan program dan subprogram yang telah diselaraskan dapat diimplementasikan sesuai arah RAPPP. • Perlu ditingkatkan komitmen dan partisipasi Pemerintah Daerah, khususnya OPD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam menghadiri dan mengikuti proses monitoring dan evaluasi. Hal ini penting karena masih terdapat OPD yang belum menghadiri forum Monevdalwas sehingga proses pemantauan dan evaluasi belum dapat dilakukan secara optimal. • BPP perlu mendorong pelaksanaan evaluasi dan koordinasi secara berkala bersama Pemerintah Daerah untuk memastikan perkembangan implementasi RAPPP dapat dipantau dan berbagai kendala yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.

Dokumentasi	 

BAB IV

CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Capaian

Pelaksanaan kegiatan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Agustus 2026 menunjukkan penguatan pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. Pelaksanaan SHEK dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai sebagai prasyarat pembangunan. Pelaksanaan tersebut menghasilkan berbagai bahan evaluasi, identifikasi isu strategis, serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar tindak lanjut pembangunan di daerah.

Pada aspek perencanaan pembangunan, BPP semakin memperkuat peran dalam mengawal implementasi RAPPP Tahun 2025–2029 melalui koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah. Penguatan komitmen keselarasan 100% program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus dengan RAPPP menjadi salah satu capaian penting. Pendampingan perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 dan pelaksanaan Monevdalwas menunjukkan bahwa proses penyelarasan mulai diarahkan tidak hanya pada kesesuaian dokumen, tetapi juga pada keterkaitan program dengan sasaran, indikator, kewenangan, kebutuhan daerah, serta manfaat bagi OAP. Dalam proses tersebut, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat telah menyelesaikan penyelarasan dan menandatangani Berita Acara Keselarasan 100%, sementara daerah lainnya melanjutkan proses penyelesaian.

Pelaksanaan SHEK Tematik bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Otsus, capaian pembangunan, serta berbagai isu strategis pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, tata kelola, dan masyarakat adat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program percepatan pembangunan Papua yang berada dalam koridor RIPPP di Kabupaten Raja Ampat memiliki tingkat keselarasan

sebesar 56% terhadap RAPPP, sehingga menjadi bahan penting untuk penguatan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada bidang Papua Sehat, SHEK menghasilkan identifikasi terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN, kesiapan akreditasi rumah sakit, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, serta kebutuhan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah dengan karakteristik geografis khusus. Pada bidang Papua Cerdas, kegiatan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta perluasan akses informasi dan persiapan generasi muda Papua terhadap pendidikan tinggi dan sekolah kedinasan. Sementara itu, pada bidang Papua Produktif, SHEK memperkuat koordinasi terkait energi, transmigrasi, pertanian, perikanan, koperasi dan UMKM, pemberdayaan pemuda adat, serta pemanfaatan CSR untuk mendukung pembangunan daerah.

Pada aspek Papua Damai dan tata kelola pembangunan, BPP turut mendorong perbaikan tata kelola Otsus, penguatan transparansi dan akuntabilitas, percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta penguatan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Berbagai kegiatan tersebut memperkuat fungsi BPP sebagai penghubung antarpihak dalam mengidentifikasi permasalahan dan mendorong penyelesaian melalui koordinasi lintas sektor.

4.2 Permasalahan

Dalam pelaksanaan SHEK selama bulan Agustus 2026 masih ditemukan adanya kesenjangan antara proses perencanaan daerah dengan arah RAPPP Tahun 2025–2029. Sebagian program dan kegiatan masih disusun terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan RAPPP pada tahap akhir, sehingga terdapat usulan yang belum selaras dengan Program Percepatan, kurang tepat dari sisi substansi maupun kewenangan, berpotensi tumpang tindih, atau belum memiliki referensi subkegiatan yang sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa RAPPP belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan sejak awal proses perencanaan.

Permasalahan juga ditemukan pada aspek koordinasi dan kapasitas perencanaan pemerintah daerah. Fungsi Bapperida/Bappeda sebagai orkestrator perencanaan lintas OPD masih perlu diperkuat agar proses penyelarasan tidak berjalan secara parsial pada masing-masing OPD. Selain itu, masih terdapat kewenangan daerah yang belum memiliki padanan yang jelas dalam Matriks RAPPP serta adanya kebutuhan untuk membedakan antara program yang bukan merupakan kewenangan daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh regulasi tetapi belum terakomodasi secara memadai dalam RAPPP.

Pada pelaksanaan program sektoral, masih terdapat permasalahan terkait keterbatasan infrastruktur, pembiayaan, sumber daya manusia, data, regulasi, dan mekanisme koordinasi. Di bidang kesehatan, permasalahan mencakup kesiapan rumah sakit, pemenuhan persyaratan akreditasi, keberlanjutan pelayanan, pembiayaan JKN, serta kondisi sarana dan prasarana. Di bidang pendidikan dan produktif, masih diperlukan penguatan kualitas perencanaan, kapasitas SDM, akses pembiayaan, pengembangan potensi ekonomi, infrastruktur pendukung, dan keterhubungan program dengan kebutuhan masyarakat.

Pada aspek tata kelola Otsus, keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Otsus dan DTI masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kesiapan perencanaan, administrasi, koordinasi, dan kapasitas aparatur. Penguatan data OAP, penerima manfaat, serta data masyarakat adat dan wilayah ulayat juga masih diperlukan sebagai dasar perencanaan dan penetapan sasaran pembangunan.

4.3 Tantangan

Tantangan utama BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya ke depan adalah memastikan agar proses penyelarasan 100% program dan kegiatan dengan RAPPP tidak berhenti pada tahap administratif atau dokumen perencanaan, tetapi dilanjutkan sampai pada implementasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan. Keselarasan perlu dipandang sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya pembangunan, khususnya Dana Otsus, benar-benar mendukung pencapaian target RAPPP serta menghasilkan output, outcome, dan manfaat nyata bagi OAP. Hal ini sejalan dengan hasil pendampingan yang

menunjukkan bahwa penyelarasan perlu dilakukan sejak awal proses perencanaan dan tidak hanya pada tahap akhir.

Tantangan lainnya adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan arah kebijakan RAPPP ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, sesuai kewenangan, dan berbasis kebutuhan daerah. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara BPP, Bappenas, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya agar berbagai permasalahan yang ditemukan melalui SHEK dapat segera ditindaklanjuti.

Selain itu, keberhasilan percepatan pembangunan Papua masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan SDM, penguatan data OAP, penyelesaian isu masyarakat adat dan tanah ulayat, penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi produktif, serta peningkatan efektivitas tata kelola dan penyaluran Dana Otsus. Tantangan tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor dan tindak lanjut yang konsisten agar hasil koordinasi tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi menghasilkan perubahan dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Agustus 2026 telah memperkuat pelaksanaan fungsi SHEK melalui koordinasi dan evaluasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan SHEK menghasilkan berbagai bahan evaluasi dan identifikasi isu strategis pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai, termasuk isu tata kelola Otsus dan perencanaan pembangunan.

Salah satu capaian strategis adalah semakin kuatnya pengawalan terhadap implementasi RAPPP Tahun 2025–2029, termasuk komitmen keselarasan 100% program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otsus dengan RAPPP. Namun demikian, hasil pelaksanaan SHEK menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kualitas perencanaan, koordinasi lintas OPD, kesesuaian kewenangan, data, pembiayaan, serta kesiapan implementasi program. Oleh karena itu, keberhasilan penyelarasan perlu diukur tidak hanya dari terpenuhinya kesesuaian dokumen, tetapi terutama dari terlaksananya program dan tercapainya hasil serta manfaat pembangunan bagi OAP.

5.2 Rekomendasi

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya perlu terus memperkuat fungsi SHEK sebagai penghubung dan pengawal implementasi RAPPP dengan memastikan hasil sinkronisasi dan harmonisasi diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan. Komitmen keselarasan 100% perlu dipertahankan sebagai prasyarat perencanaan, dengan penekanan pada pencapaian output, outcome, dan manfaat nyata bagi OAP.

Penguatan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam penyempurnaan

perencanaan, pemenuhan kewenangan, penyelesaian kendala implementasi, serta pengawalan hasil pendampingan Musrenbang dan Monevdalwas. Pemerintah Daerah juga perlu memperkuat fungsi orkestrasi perencanaan agar seluruh OPD menggunakan RAPPP sebagai acuan sejak tahap awal penyusunan program dan kegiatan.

Selanjutnya, diperlukan penguatan kualitas data OAP dan penerima manfaat, penyelesaian isu masyarakat adat dan tanah ulayat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor ekonomi produktif, serta percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran dan pengelolaan Dana Otsus dan DTI. Seluruh tindak lanjut tersebut perlu dilakukan secara terukur dan dipantau secara berkala untuk memastikan rekomendasi hasil SHEK memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya.

5.3 Penutup

Laporan bulanan ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. Pelaksanaan kegiatan selama bulan Agustus 2026 menunjukkan bahwa fungsi SHEK semakin diarahkan untuk menjembatani kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Ke depan, hasil identifikasi, evaluasi, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui pelaksanaan SHEK perlu terus dikawal sampai pada tahap tindak lanjut dan implementasi. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi BPP tidak berhenti pada proses sinkronisasi dan harmonisasi, tetapi dapat berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan Papua yang lebih terarah, efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya OAP.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

DATA BASELINE/INDIKATOR

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	**69.83**	**70.02**	**70.31**
2	Prevalensi Stunting (%)	31	21	30.5
3	Eliminasi Malaria (Kab/Kota)	-	**1 (Kab. Sorong Selatan)**	**2 (Kab. Sorong Selatan dan Kab. Maybrat)**
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	**8.23**	**8.39**	**8.69**
5	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	**13.87**	**13.88**	**13.89**
6	Tingkat Kemiskinan (%)	18.98	18.13	17.95
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.58	6.48	6.85 (Agustus 2025)
8	Realisasi Investasi PMA-PMDN (Rp Triliun/Miliar)	3.08	3.009,5	2.4 (Januari-September 2025)

***Sumber:**

- **BPS**
- **Bappenas (RAPPP)**
- **Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM)**
- **Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya**
- **BKPK Kemenkes**
- **SSGI Kemenkes**

STRATEGIS BERSAMA (SANGAT BERBOBOT)

Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026 — Asistensi Bappenas–BPP, 19–24 Agustus 2026

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan asistensi dalam rangka perbaikan hasil evaluasi pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah memiliki keselarasan dengan RAPPP Tahun 2025–2029, sesuai kewenangan daerah, memiliki sasaran yang tepat, tidak tumpang tindih, serta mendukung pencapaian target pembangunan Papua. Proses pendampingan juga menjadi bagian dari penguatan peran BPP sebagai Tim Koordinasi Strategis Sinergi Implementasi RAPPP.

Hasil asistensi menunjukkan adanya kemajuan dalam proses penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan RAPPP, termasuk telah tercapainya penyelarasan 100% di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Pada saat yang sama, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki pada daerah lainnya, antara lain ketidaktepatan substansi, kesesuaian kewenangan, referensi RAPPP, potensi duplikasi kegiatan, serta kapasitas perencanaan. BPP bersama Bappenas mendorong agar proses penyelarasan dilaku

sejak tahap awal perencanaan dan dilanjutkan dengan monitoring, evaluasi, pengendalian, serta pengawasan terhadap implementasinya.

Keselarasan 100% dengan RAPPP merupakan prasyarat, bukan tujuan akhir. Keberhasilan pembangunan Papua ditentukan oleh sejauh mana keselarasan tersebut diterjemahkan menjadi program yang terlaksana, menghasilkan output dan outcome yang nyata, serta memberikan manfaat bagi OAP.

STRATEGIS BERSAMA – SHEK TEMATIK RAJA AMPAT

SHEK Tematik Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus — 13 Agustus 2026

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan SHEK Tematik bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan mengidentifikasi berbagai capaian serta persoalan pembangunan daerah. Evaluasi mencakup keterkaitan program pembangunan dengan RIPPP dan RAPPP, capaian pada bidang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, pemanfaatan Dana Otsus, serta isu masyarakat adat, data OAP, perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Hasil SHEK menunjukkan masih terdapat ruang penguatan dalam penyelarasan program daerah dengan RAPPP, termasuk temuan bahwa tingkat keselarasan program yang berada dalam koridor RIPPP pada saat evaluasi masih sebesar 56%. Selain aspek perencanaan, evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, kualitas data OAP, pengelolaan Dana Otsus, serta integrasi isu masyarakat adat dan wilayah ulayat dalam pembangunan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi BPP dalam menyusun rekomendasi dan mendorong tindak lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

SHEK Tematik menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan Otsus tidak hanya dinilai dari realisasi program dan anggaran, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan arah pembangunan Papua, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, serta manfaat yang diterima masyarakat dan OAP.

PAPUA SEHAT

SHEK BPP PBD dalam rangka Persiapan Pendampingan Akreditasi RSU Pratama Tambrauw — 22 Agustus 2026

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan SHEK dalam rangka memetakan kesiapan RSU Pratama Tambrauw menghadapi proses akreditasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang memengaruhi keberlangsungan pelayanan kesehatan. Hasil penelaahan menunjukkan adanya permasalahan multidimensi, meliputi perizinan operasional rumah sakit, kesiapan infrastruktur dan fasilitas pelayanan, pengelolaan keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, tata kelola BLUD, pengelolaan data dan rekam medis, hingga pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Hasil SHEK menunjukkan perlunya penanganan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, Kementerian Kesehatan, serta pihak terkait. BPP mendorong percepatan penyelesaian perizinan, penataan tata kelola dan administrasi rumah sakit, pemenuhan sarana prasarana, penguatan SDM, penataan sistem pelayanan dan data, serta persiapan transisi menuju BLUD. Seluruh langkah tersebut diarahkan agar kesiapan rumah sakit tidak hanya memenuhi persyaratan akreditasi, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tambrauw.

Penguatan Papua Sehat membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki tata kelola, SDM, infrastruktur, dan pembiayaan yang memadai. Karena itu, penyelesaian persoalan RSU Pratama Tambrauw menjadi bagian penting dalam memastikan percepatan pembangunan kesehatan benar-benar menghasilkan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

PAPUA CERDAS

SHEK BPP PBD bersama Kanwil DJBC Khusus Papua terkait Pendaftaran PKN STAN 2026 — 26 Agustus 2026

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan koordinasi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua dalam rangka mendukung akses putra-putri Papua terhadap pendidikan tinggi, khususnya melalui pendaftaran PKN STAN Tahun 2026. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tahapan seleksi, persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam rangka memperluas informasi dan kesiapan calon peserta dari Papua Barat Daya.

Hasil koordinasi menunjukkan adanya dukungan Kanwil DJBC dalam penyebarluasan informasi, pemberian pemahaman mengenai tahapan seleksi, serta penyediaan materi

yang dapat membantu calon peserta mempersiapkan diri. BPP selanjutnya mendorong penyebarluasan informasi melalui media sosial serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di kabupaten/kota. Upaya tersebut juga diarahkan agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan peserta didik sejak tingkat SMA/sederajat melalui penguatan kesiapan akademik dan pemahaman mengenai mekanisme seleksi pendidikan tinggi dan sekolah kedinasan.

Papua Cerdas tidak hanya berbicara tentang peningkatan akses pendidikan, tetapi juga memastikan putra-putri Papua memiliki informasi dan kesiapan yang memadai untuk memanfaatkan peluang pendidikan berkualitas. Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan instansi pusat menjadi penting agar peluang afirmasi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas SDM Papua.

PAPUA PRODUKTIF

Audiensi BPP bersama Kementerian ESDM dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Dukungan Sektor Energi terhadap Percepatan Pembangunan Papua — 5 Agustus 2026

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan audiensi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka memperkuat sinkronisasi dukungan sektor energi terhadap percepatan pembangunan Papua. Pembahasan difokuskan pada dukungan penyediaan energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan dan pelaksanaan program PLTS Terpadu Tahun Anggaran 2026 pada wilayah terpencil, kepulauan, perbatasan, serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses energi.

Hasil audiensi memperkuat koordinasi antara BPP, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program energi di Papua Barat Daya. Dukungan sektor energi dipandang tidak hanya sebagai pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga sebagai pengungkit bagi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat. BPP akan terus mendorong koordinasi dan pemantauan tindak lanjut pembangunan PLTS Terpadu bersama Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar dukungan energi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Papua Produktif membutuhkan infrastruktur dasar yang mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan energi yang memadai, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan, menjadi fondasi penting untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang pengembangan ekonomi lokal.

PAPUA DAMAI

Peran Aktif SHEK BPP PBD pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Maybrat — 19–20 Agustus 2026

BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya turut berperan aktif dalam rapat koordinasi dan sinergitas stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Maybrat sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi penyelesaian persoalan keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang untuk menerima aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait penanganan konflik, perlindungan dan pemulihan korban, penegakan hukum, evaluasi keberadaan Satgas Non Organik, serta kebutuhan dukungan pemerintah dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

Hasil koordinasi menunjukkan perlunya penanganan yang menyeluruh melalui sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung proses penanganan hukum dan pemulihan korban, sementara berbagai aspirasi terkait evaluasi kebijakan keamanan, kompensasi, serta penyelesaian secara adat menjadi bahan koordinasi lebih lanjut. BPP memperoleh bahan strategis untuk mendukung fungsi SHEK dan memastikan isu keamanan, pemulihan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan di wilayah terdampak dapat menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor.

Papua Damai merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penyelesaian konflik perlu berjalan beriringan dengan pemulihan korban, pemulihan layanan dasar, penguatan kepercayaan masyarakat, serta koordinasi lintas pihak agar stabilitas keamanan dapat menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan di wilayah terdampak.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF